



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM
PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT (PLASMA) DENGAN
POLA KEMITRAAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN BARITO TIMUR**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

OKTAVINA

NIM. 500873766

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY PLANTATION SMALLHOLDERS (PLASMA) WITH PARTNERSHIP PATTERN BETWEEN COMMUNITIES AND PALM OIL PLANTATION COMPANIES IN BARITO TIMUR REGENCY**

Oktavina

Oktavina1981@gmail.comGraduate Studies Program
Indonesia Open University

One regulation that provides fresh air for the people around the area of oil palm plantations is regulation about the obligation of a company to cooperate with communities around the plantation. The public policy issued by the government regarding the development of community plantation Smallholders is summarized in Law Number 39 of 2014 concerning Plantations Article 58 which states that "Plantation Companies that have Plantation Business Permits or Plantation Business Permits for Cultivation are obliged to facilitate the construction of community plantation Smallholders around the lowest of 20% of the total plantation area cultivated by Plantation Companies ". The study aims to find out how the partnership pattern in the development of community plantation Smallholders (plasma), and how is the government's involvement in the development of community plantation Smallholders (plasma). The research aims to find out how the implementation of the partnership pattern in the development of community plantation Smallholders (plasma), and how the government engages in the implementation of the partnership pattern policy for development of community plantation Smallholders (plasma).

The method used in the study was interviews / questionnaires, field observations, and documentation studies. The collected data is then analyzed and linked to the theories of Van Meter and Van Horn. Research uses a qualitative approach. The results showed that the policy of Public Policy Implementation, went quite well and policies were accepted by plantation companies and also accepted by the society in East Barito Regency. However, there is still no visible involvement of the local government in giving sanctions for plantation companies that have not or cannot realize the construction of community plantation Smallholders (plasma), as stated in the Republic of Indonesia Law Number 39 of 2014 concerning Plantation, article 60 paragraph (2). Suggestions in the future, Local Government needs to encourage plantation companies to realize plasma obligations in accordance with the regulation, Local Government can also take a firm stance to provide administrative sanctions for plantation companies that do not or have not realized the construction of plantation Smallholders (plasma).

Keywords: Policy, Development of Community plantation Smallholders (Plasma).

ABSTRAK**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN
KEBUN MASYARAKAT (PLASMA) DENGAN POLA KEMITRAAN
ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BARITO TIMUR**

Oktavina

Oktavina1981@gmail.com

Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

Salah satu regulasi yang memberikan angin segar bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit ialah regulasi tentang kewajiban sebuah perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar perkebunan. Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah tentang pembangunan kebun masyarakat terangkum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 58 menyatakan bahwa "Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan". Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pola kemitraan dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma), dan bagaimana keterlibatan pemerintah dalam implementasi kebijakan pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat (plasma). Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan wawancara/kuisisioner, observasi di lapangan, dan studi dokumentasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teori Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan berjalan cukup baik dan kebijakan diterima oleh perusahaan perkebunan dan juga diterima oleh masyarakat di Kabupaten Barito Timur. Serta ada keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mendorong pembangunan kebun untuk masyarakat melalui pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan perkebunan. Namun masih belum terlihat keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemberian sanksi bagi perusahaan perkebunan yang belum atau tidak dapat merealisasikan pembangunan kebun masyarakat (plasma), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 60 ayat (2). Saran ke depan, Pemerintah Daerah perlu mendorong perusahaan perkebunan agar merealisasikan kewajiban plasma sesuai regulasi, Pemerintah Daerah juga dapat mengambil sikap tegas untuk memberikan sanksi administratif bagi perusahaan perkebunan yang tidak atau belum merealisasikan pembangunan kebun masyarakat (plasma).

Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma).

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) Dengan Pola Kemitraan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Barito Timur adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 17 Januari 2019
Yang Menyatakan



[Handwritten Signature]

Oktavina

NIM 500873766

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
DALAM PEMBANGUNAN KEBUN
MASYARAKAT (PLASMA) DENGAN POLA
KEMITRAAN ANTARA MASYARAKAT
DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BARITO
TIMUR**

NAMA : Oktavina

NIM : 500873766

PROGRAM STUDI : **ILMU ADMINISTRASI BIDANG MINAT
ADMINISTRASI PUBLIK**

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Tresia Kristiana, S.E., M.Si
NIDN. 11.0106.6901

Pembimbing II

Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si
NIP. 19740818 200912 1 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. Abdul Aziz Sanapiah, M.P.A
NIP. 19470120 197306 1 001

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial,
dan Politik

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan FHISIP

Dr. Sofjan Ariqin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : Oktavina
NIM : 500873766
**PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI BIDANG MINAT
ADMINISTRASI PUBLIK**
**JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
DALAM PEMBANGUNAN KEBUN
MASYARAKAT (PLASMA) DENGAN POLA
KEMITRAAN ANTARA MASYARAKAT
DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BARITO
TIMUR**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Kamis/17 Januari 2019
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS.

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Darmanto, M.Ed

Penguji Ahli

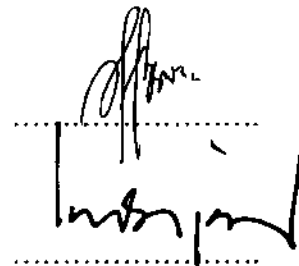
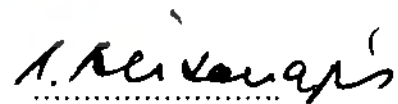
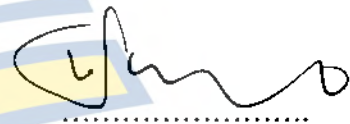
Nama : Prof. Dr. Abdul Aziz Sanapiah, M.P.A

Pembimbing I

Nama : Dr. Tresia Kristiana, S.E., M.Si

Pembimbing II

Nama : Dr. Kusnida Indrajaya M.Si



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dapat saya selesaikan dengan baik. Penulisan TAPM ini dilaksanakan, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik.

Saya menyadari banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan, saya sampaikan kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Ketua Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Palangkaraya;
3. Dr. Tresia Kristiana, S.E., M.Si dan Dr. Kusnida Indrajaya, M.Si yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Orang Tua, Suami dan Anak-anak tercinta yang turut memberi dukungan, semangat dan doa kepada saya selama menjalani masa studi sampai pada penyusunan TAPM ini;
5. Semua pihak yang telah mendukung kelancaran penyusunan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Penulis

Oktavina

RIWAYAT HIDUP

Nama : Oktavina
NIM : 500873766
Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya 16 Oktober 1981

Riwayat Pendidikan : - Lulus SD di SDN IV Buntok pada tahun 1993
- Lulus SMP di SMPN II Buntok pada tahun 1996
- Lulus SMA di SMAN I Buntok pada tahun 1999
- Lulus SI di Universitas Palangkaraya pada tahun 2003

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2008 s/d 2011 sebagai Pelaksana di Dinas
Kebutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur
Provinsi Kalimantan Tengah.
- Tahun 2012 s/d 2015 sebagai Kepala Seksi Pengolahan
Hasil dan Pemasaran di Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Barito Timur Provinsi
Kalimantan Tengah.
- Tahun 2016 s/d 2018 sebagai Kepala Seksi Bina Usaha,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan di Dinas
Pertanian Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan
Tengah.

Palangka Raya, 17 Januari 2019

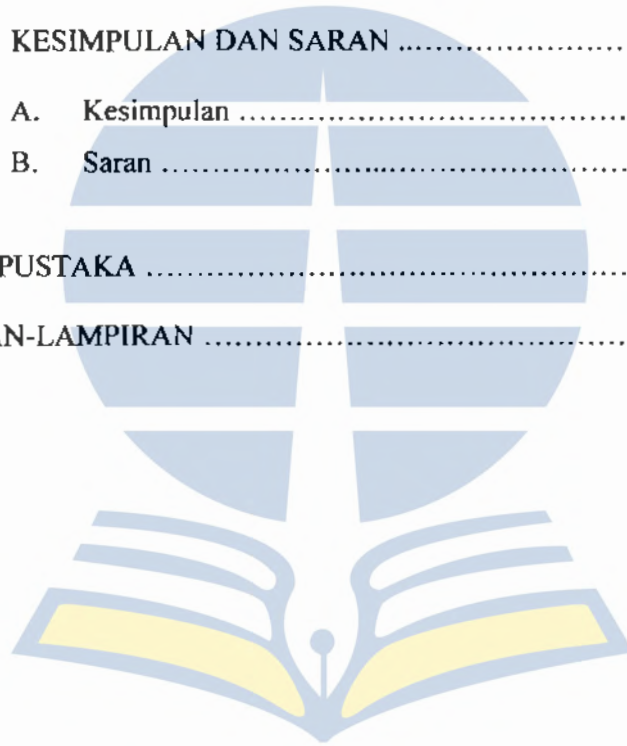


Oktavina
NIM. 500873766

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	iv
LEMBAR PENGESAHAN TAPM	v
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
B. Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) dengan Pola Kemitraan	18
C. Kerangka Berpikir	23
D. Definisi Operasional	23
BAB III. METODE PENELITIAN	27
A. Desain Penelitian	27
B. Sumber Data/Responden	29

C. Instrumen Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	33
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Barito Timur	35
B. Perkembangan Usaha Perkebunan di Kabupaten Barito Timur	37
C. Hasil	39
D. Pembahasan	89
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	130



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Diagram Kerangka Berpikir	23
Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Barito Timur	36
Gambar 3. Peta Izin Usaha Perkebunan Besar di Kabupaten Barito Timur	39
Gambar 4. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) Yang Dibangun PT. Agro Mandiri Sukses	84
Gambar 5. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) Yang Dibangun PT. Heroes Green Energy	84
Gambar 6. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) Yang Dibangun PT. Bhadra Cemerlang	85
Gambar 7. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) Yang Dibangun PT. Borneo Ketapang Indah	85
Gambar 8. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) Yang Dibangun PT. Indopenta Sejahtera Abadi	86
Gambar 9. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) Yang Dibangun PT. Ketapang Subur Lestari	86
Gambar 10. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) Yang Dibangun PT. Sawit Graha Manunggal	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Timur	5
Tabel 2. Jumlah Narasumber sebagai Responden dalam Penelitian.....	30
Tabel 3. Data Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Barito Timur Sampai Dengan Juli 2018	37
Tabel 4. Dokumen Pembangunan Kebun Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Oleh Perusahaan Perkebunan	88
Tabel 5. Data Realisasi Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) Oleh 7 (tujuh) Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Barito Timur	92



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Deskripsi Jawaban Narasumber Untuk Point A	130
Lampiran 2. Deskripsi Jawaban Narasumber Untuk Point B	136
Lampiran 3. Deskripsi Jawaban Narasumber Untuk Point C	141
Lampiran 4. Deskripsi Jawaban Narasumber Untuk Point D	146
Lampiran 5. Deskripsi Jawaban Narasumber Untuk Point E	151
Lampiran 6. Deskripsi Jawaban Narasumber Untuk Point F	156



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diyakini akan mampu mendekatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memupuk demokrasi. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, kewenangan pemerintah daerah menjadi lebih luas dari sebelum adanya desentralisasi. Akan tetapi dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, diharapkan pemerintah daerah melaksanakannya dengan tanggung jawab berdasarkan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Pelayanan publik yang baik menjadi isu kebijakan yang strategis, karena pelayanan publik sangat berimplikasi luas khususnya dalam memperbaiki kepercayaan kepada Pemerintah. Kebijakan publik yang telah diadopsi dan dilegitimasi oleh pemerintah dan lembaga legislatif menjadi suatu regulasi, sudah semestinya diimplementasikan melalui sistem administrasi publiknya. Sejatinya setiap regulasi yang diterbitkan pemerintah pada dasarnya untuk kebaikan seluruh pihak, dan telah melewati berbagai macam kajian serta pertimbangan yang mendalam sebelum akhirnya regulasi tersebut digulirkan.

Salah satu regulasi yang memberikan angin segar bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit, baik yang diusahakan swasta maupun perusahaan BUMN, ialah regulasi tentang kewajiban sebuah perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat

sekitar perkebunan. Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah tentang pembangunan kebun masyarakat terangkum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 58 yang menyatakan bahwa :

“Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan”.

Pembangunan kebun masyarakat ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013 Pasal 15 yang menekankan apabila terjadi pembangunan perkebunan kelapa sawit, perusahaan inti wajib untuk membangun kebun sawit masyarakat (plasma) di sekitarnya, di mana perusahaan perkebunan yang mengajukan izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling sedikit 20% dari luas areal IUP-B atau IUP. Regulasi di daerah yang mengatur pembangunan kebun masyarakat tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Pasal 18 menyatakan bahwa:

“Pembangunan kebun masyarakat dilakukan melalui Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Unit Pelaksana Proyek (UPP), Pola Parsial, Pola Perbantuan, dan Pola Swadaya, Pola Inti Plasma dan Pola Kemitraan”.

Kalimantan Tengah dengan Luas wilayah 157.983 Km² mencakup 1 kota dan 13 kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Barito Timur. Kabupaten Barito Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur.

Kabupaten Barito Timur yang beribukota di Tamiang Layang secara astronomis terletak antara 1° 2' Lintang Utara dan 2° 5' Lintang Selatan, 114° dan 115° Bujur Timur yang diapit oleh kabupaten tetangga yaitu sebelah Utara dengan wilayah Kabupaten Barito Selatan, di sebelah Timur dengan sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan serta di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur tercatat seluas 3.834 km² yang meliputi sepuluh (10) kecamatan.

Terbentuknya Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan, yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, pada hakekatnya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di daerah menuju masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Terkait otonomi daerah, kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pembangunan ekonomi, pembangunan sub sektor perkebunan menempati prioritas. Hal ini didasarkan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya lahan dan agroklimat yang sesuai untuk pengembangan komoditi perkebunan.

Kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan sektor perkebunan, harus mampu menjawab tantangan mengenai kesejahteraan para petani. Program kemitraan perusahaan dan petani yang dikembangkan oleh

industri sawit ditengarai mampu memberikan keuntungan secara bisnis dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Bentuk kemitraan yang dimaksud adalah kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan bertanggungjawab.

Namun kenyataan yang terjadi sangatlah memprihatinkan, dan semakin membuktikan bahwa daya tawar masyarakat sangatlah lemah. Munculnya konflik horizontal di sekitar perkebunan kelapa sawit, diyakini lantaran belum sempurnanya penerapan ketetapan inti-plasma, sehingga memicu kecemburuan dan klaim lahan. Regulasi yang seharusnya menjadi acuan dan harapan masyarakat, untuk memiliki perkebunan sawit guna memperbaiki nasib dan meningkatkan kesejahteraan hidup, ternyata memunculkan beragam penafsiran. Hasilnya pembangunan perkebunan plasma masyarakat belum bisa dipastikan, dan belum menjadi fokus perusahaan. Sedangkan disaat bersamaan perusahaan inti telah memperoleh implikasi positif dari telah terpanennya buah kelapa sawit dan memprosesnya di Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Kondisi demikian pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal antara perusahaan dengan masyarakat setempat.

Beberapa persoalan yang kerap terjadi dalam program kemitraan plasma sawit diantaranya, adalah kewajiban pembangunan Plasma seluas 20% dari luasan yang diusahakan inti sering tidak dilaksanakan dengan benar, baik secara luasan, maupun waktu pelaksanaan pembangunan kebun plasma. Berdasarkan Data Matrik Perkembangan Perusahaan Perkebunan per Pebruari 2018 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur Bidang

Perkebunan, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Barito Timur berjumlah 14 perusahaan. Adapun data lengkap Perusahaan Perkebunan tersebut sebagai berikut :

Tabel 1. Data Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Timur.

No.	Nama Perusahaan	SK Izin Usaha Perkebunan (Nomor dan Tanggal)	Luas Areal Izin Usaha Perkebunan (Ha)	Kewajiban Plasma untuk masyarakat 20% dari IUP (Ha)
1.	PT. Agro Mandiri Sukses	387 Tahun 2009 13-8-2009	14.363	2.872,6
2.	PT. Borneo Subur Semesta	258 Tahun 2012 27-6-2012	6.000	1.200
3.	PT. Ciliandry Anky Abadi	387 Tahun 2015 6-11-2015	3.283	656,6
4.	PT. Heroes Green Energy	388 Tahun 2015 6-11-2015	3.400	680
5.	PT. Tamiyang Sumber Rejeki	283 Tahun 2012 4-7-2012	20.000	4.000
6.	PT. Tirta Madu	389 Tahun 2015 6-11-2015	5.409	1.081,8
7.	PT. Bhadra Cemerlang	187 Tahun 2006 16-6-2006	6.168	1.233,6
8.	PT. Borneo Ketapang Indah	390 Tahun 2015 6-11-2015	10.600	2.120
9.	PT. Indopenta Sejahtera Abadi	388 Tahun 2009 13-8-2009	16.455	3.291
10.	PT. Ketapang Subur Lestari	341 Tahun 2009 24-6-2009	21.000	4.200
11.	PT. Sandabi Indah Lestari	366 Tahun 2011 4-11-2011	5.306,112	1.061,2224
12.	PT. Mitra Jaya Agro Palm	4 Tahun 2012 12-1-2012	4.822	964,4
13.	PTP. Nusantara XIII	187/Mentan/VI/80 6-1-1980	10.500	2.100
14.	PT. Sawit Graha Manunggal	383 Tahun 2017 22-12-2017	17.467,23	3.493,446
Jumlah			144.773,342	28.954,6684

Total keseluruhan luasan Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan perkebunan komoditi kelapa sawit adalah 144.773,342 Hektar. Total kewajiban 14 perusahaan perkebunan untuk membangun kebun masyarakat (plasma) sesuai ketentuan adalah 20% dari IUP yaitu 28.954,6684 Hektar.

Pembangunan kebun inti yang tidak bersamaan dengan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dapat menimbulkan persoalan sosial kemasyarakatan. Sebab itu kedepan sedianya, penerapan ketentuan ini lebih disempurnakan, sehingga kemungkinan munculnya konflik di lapangan bisa diminimalisir. Kecemburuan sosial pun bisa dihindari, sehingga perkebunan kelapa sawit bisa menjadi komoditas yang bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah.

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam kaitannya kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan kewajiban pembangunan kebun masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan. Mengacu pada latar belakang di atas maka judul penelitian ini adalah **“Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) dengan Pola Kemitraan Antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Timur”**.

Pembangunan kebun masyarakat (plasma) oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan perkebunan. Meningkatkan kesejahteraannya, dan juga dengan harapan dapat terjalin kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dengan dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan, sehingga tercipta sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pola kemitraan dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) yang diterapkan Perusahaan Perkebunan kepada masyarakat?
2. Bagaimana keterlibatan Pemerintah dalam implementasi kebijakan pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat (plasma) antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pola kemitraan dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) yang diterapkan Perusahaan Perkebunan kepada masyarakat.

2. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan pemerintah dalam implementasi kebijakan pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat (plasma) antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu administrasi publik secara khususnya, terutama tentang kebijakan publik dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dan para pihak yang berkepentingan, dalam menilai pelaksanaan kebijakan publik terkait pembangunan kebun masyarakat (plasma) oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan di Kabupaten Barito Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri.

Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda, seperti menurut Thomas R. Dye (1981:2) menyatakan "*Whatever governments choose to do or not to do*", artinya apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dye juga mengatakan bahwa

apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan.

Menurut William N. Dunn dalam Inu Kencana Syafie (2006:106), kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Mac Rae dan Wilde dalam Islamy (2010:1.8) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang.

Andeson dalam Islamy (2010:1.9-10) memberi definisi kebijakan negara sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.

Easton dalam Islamy (2010:1.10) menyatakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.

Sehingga dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih atau dialokasikan secara sah, oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat/publik (Islamy, 2010:1.10).

Secara sederhana kebijakan publik menurut Nugroho (2008:61) dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar (seperti didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki perundang-undangan yaitu : 1). UUD 1945. 2). UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. 3). Peraturan Pemerintah. 4). Peraturan Presiden. 5). Peraturan Daerah.)
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro atau kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu kajian tentang kebijakan publik adalah terkait dengan implementasi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Mempelajari implementasi kebijakan publik sangat krusial dan kompleks dalam perspektif administrasi publik dan kebijakan publik. Kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh George Edward III (1980:1) sebagai berikut :

"The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementations, as we have seen, is the stage policy making between the establishment of a policy –such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy of the people whom it affects".

Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Nawawi (2009:131) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang

penting atau keputusan Balai Penelitian. Selain itu juga Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2009:131) mendefinisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

James P. Lester dan Joseph Stewart dalam Nugroho (2009:615) mendefinisikan implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Pasolong (2007:57), berpendapat bahwa orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu pemerintah yang berlaku.

Sementara itu menurut Wahab (2001:89), implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan kebijakan yang masih abstrak ke dalam realita. Sejalan dengan pendapat tersebut, Van Meter dan Van Horn dalam Wibawa (1994:15) mendefinisikan implementasi kebijakan

sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan.

Memperhatikan uraian di atas, dapat dipahami bahwa implementasi memiliki makna penting. Implementasi bersifat sangat interaktif dengan kebijakan yang mendahuluinya. Melalui proses implementasi, diketahui sejauhmana suatu kebijakan dapat mengadopsi aspirasi sekaligus menyentuh masyarakat untuk secara sukarela melakukannya sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dengan kata lain, melalui implementasi dapat diketahui apakah suatu kebijakan telah menjawab suatu persoalan atau sebaliknya.

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks. Untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, berikut ini beberapa teori implementasi dari beberapa ahli implementasi.

a. Teori Implementasi Kebijakan Cheema dan Rondinelli

Menurut Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono (2005:101) ada empat kelompok variable yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

b. Teori Implementasi Kebijakan Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (1980:11) dalam Nugroho (2004:176) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup 1). Sejuahmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat isi kebijakan; 2). Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*; 3). Sejuahmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 4). Apakah letak sebuah program sudah tepat; 5). Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya secara rinci, dan 6). Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Variabel lingkungan implementasi mencakup 1). Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2). Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, dan 3). Tingkat kepatuhan dan reponsivitas kelompok sasaran.

Kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dengan penyediaan dana, maka implementasi kebijakan dilakukan. Pelaksanaannya sendiri tergantung pada *implementability* dari program, yang dapat dilihat dari isi kebijakan yang mencakup a). kepentingan yang terpengaruhi, 1). jenis manfaat, 2). derajat perubahan, 3). kedudukan *policy maker*, dan 4). siapa pelaksananya, kemudian sumber daya dan konteks kebijakan mencakup 1). kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana, 2). karakteristik lembaga dan 3). kepatuhan dan daya tanggap.

c. Teori Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian

Duet Sabatier dan Mazmanian dalam Nugroho (2004:130) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. **Pertama** variable independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan apa yang dikehendaki.

Kedua variabel *intervening*, yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan sumber dana alokasi dana, keterpaduan hierarki diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan resources dari konsisten, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang

dibuat dan dilaksanakan tersebut atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

d. Teori Implementasi Kebijakan Edward III

Pandangan/teori George C. Edward III dalam Nawawi (2009:136-138), model implementasi kebijakan perspektif *top down* berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yakni : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat perspektif dijelaskan di bawah ini : 1) Komunikasi; implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang akan dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian suatu kebijakan dan tujuan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran bersangkutan. 2) Sumber daya; dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material dan metode, sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan

masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3) Disposisi (sikap): suatu disposisi dalam implementasi adalah karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. 4) Struktur birokrasi; organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis berbagai posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang ditetapkan.

e. **Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Teori kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal ini berarti bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah dimensi yaitu ; 1). Sumber daya; 2). Sasaran dan kebijakan; 3). Komunikasi; 4). Karakteristik badan pelaksana; 5). Kondisi sosial ekonomi; 6). Disposisi/Sikap para pelaksana. (Nugroho 2004:128).

Berdasarkan penjelasan di atas, teori yang dipakai dalam penelitian ini dan menjadi rujukan adalah model implementasi kebijakan oleh **Van Meter dan Van Horn**. Adapun alasan pemilihan teori ini karena Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara

individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan.

Teori kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Teori kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal ini berarti bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah dimensi yaitu ; 1). Standar dan sasaran kebijakan/ukuran; 2). Sumber daya; 3). Karakteristik badan pelaksana; 4). Komunikasi antar badan pelaksana; 5). Disposisi/sikap para pelaksana; 6). Kondisi sosial ekonomi.

B. Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) dengan Pola Kemitraan

Pada tataran nasional dan lokal, minyak kelapa sawit telah mampu berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan/lapangan kerja, pembangunan sosial dan pengurangan kemiskinan, pengembangan wilayah, pemenuhan kebutuhan pangan dan non-pangan dan ekspor yang mendatangkan devisa negara.

Pola kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan besar dengan petani plasma merupakan inti dari implementasi kebijakan publik. Dengan metoda analisis kualitatif deskriptif, output yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa rekomendasi tentang implementasi kemitraan agribisnis kelapa sawit guna mencapai suatu kemitraan ideal yang berkelanjutan secara

holistik agar mampu meningkatkan nilai tambah kelapa sawit sekaligus meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Pola kemitraan akan menciptakan petani mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi petani plasma dan perlu keterlibatan instansi terkait dalam melaksanakan pola kemitraan dengan memberikan pengarah dan petunjuk dalam pembangunan pola kemitraan. Pola kemitraan yang dikembangkan harus ditujukan untuk menciptakan kemandirian petani, ada rasa kepedulian, rasa kebersamaan, dan keberlanjutan hubungan kerjasama kemitraan secara menyeluruh, bukan secara parsial. Masing-masing pelaku kemitraan hendaknya dapat mengoptimalkan kinerja kemitraan.

Pola kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama pembangunan dan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma melalui lembaga koperasi dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, utuh dan berkesinambungan.

Dalam rangka merealisasikan kemitraan sebagai wujud dari keterkaitan usaha, dalam pembangunan kebun masyarakat maka diselenggarakan melalui pola kemitraan inti plasma. Perusahaan perkebunan bertindak sebagai inti, membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai plasma. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 27 huruf (a) :

“yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi,

perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha”.

Kerjasama inti plasma akan diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma. Dalam program inti plasma ini diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pada pihak usaha kecil selaku pihak plasma yang mendapat bantuan dalam upaya mengembangkan usahanya, maupun pada pihak usaha besar atau usaha menengah yang mempunyai tanggungjawab sosial untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha untuk jangka panjang. Selain itu juga sebagai suatu upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha pola inti plasma yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain : (1) Pengusaha Besar (Pemprakarsa), (2) Pengusaha Kecil (Mitra Usaha) dan (3) Pemerintah. Peran pengusaha besar selaku (inti) sebagaimana tersebut di atas tentunya juga harus diimbangi dengan peran usaha kecil (plasma) yaitu meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya yang berkelanjutan serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar (inti).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Bagian Kecmpat Kemitraan Usaha Perkebunan, Pasal 57 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa :

- (1). Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2). Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerjasama : a. penyediaan sarana

produksi, b. produksi, c. pengolahan dan pemasaran, d. kepemilikan saham, dan e. jasa pendukung lainnya.

Pasal 58 ayat 1, 2,3 dan 4 menyatakan bahwa :

- (1). Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
- (2). Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
- (4). Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Izin Perusahaan Perkebunan pasal 15 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 menyatakan bahwa :

- (1). Perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (2). Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar IUP-B atau IUP.
- (3). Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. ketersediaan lahan
 - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta
 - c. kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.
- (4). Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :

- a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP, dan
 - c. sanggup melakukan pengelolaan kebun.
- (5). Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.
- (6). Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, bahwa pembangunan kebun masyarakat yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan besar dengan pola kemitraan akan menciptakan sinergi serta harmonisasi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Pola pembangunan kebun masyarakat, dilaksanakan dengan pola yang disetujui bersama antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar yang biasa dikenal dengan pola kemitraan. Pola tersebut berupa pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharaan kebun, pola pembangunan kebun atau perusahaan perkebunan menyediakan benih, pembinaan dan sarana produksi atau pola lainnya yang disepekat bersama.

Kebijakan publik dalam pembangunan kebun masyarakat ini, sebagai upaya pemerintah untuk menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan publik dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) oleh perusahaan perkebunan dengan pola kemitraan di Kabupaten Barito Timur.

Beikut kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini :



Gambar 1. Diagram Kerangka Berpikir.

D. Definisi Operasional

1. Implementasi kebijakan pola kemitraan dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma):

- Standar dan sasaran kebijakan/ukuran :** Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para

- pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.
- b. Sumber Daya :** Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
- c. Karakteristik badan pelaksana :** Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.
- d. Kondisi sosial ekonomi dan politik :** Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan yang kondusif.

2. Keterlibatan Pemerintah dalam implementasi kebijakan pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat (plasma) antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan:

- a. Komunikasi antar badan pelaksana :** Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.
- b. Disposisi/Sikap para pelaksana :** Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral

atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) oleh perusahaan perkebunan dengan pola kemitraan di Kabupaten Barito Timur. Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Arikunto (2007:234) mengatakan penelitian deskriptif merupakan penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada pengungkapan makna dan proses, latar alami (*natural setting*) digunakan sebagai sumber data langsung. Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan/menceritakan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1985:63).

Dari beberapa pendapat di atas, maka peneliti memilih pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dikarenakan pendekatan kualitatif memiliki sifat : 1. Lebih fleksibel; 2. Dapat menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; 3. Lebih peka.

1. Indikator Penelitian

Menurut Moleong (2001:62-63), indikator penelitian kualitatif ini dapat berkembang atau berubah sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, luwes mengikuti pola pikir yang empirikal dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dengan adanya kejelasan indikator ini, maka peneliti dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan/dipakai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka indikator dalam penelitian implementasi kebijakan publik dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) oleh perusahaan perkebunan dengan pola kemitraan di Kabupaten Barito Timur yaitu dengan menekankan pada sejauhmana implementasi kebijakan publik tentang pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

2. Jadwal dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama ± 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Juli 2018 sampai dengan September 2018.

Lokasi penelitian ini difokuskan pada 14 Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Barito Timur. Adapun alasan mengambil lokasi penelitian tersebut karena Perusahaan Perkebunan yang ada di Kabupaten Barito

Timur diwajibkan melaksanakan kebijakan publik dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) dengan pola kemitraan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

B. Sumber Data/Responden

Arikunto (2010:172) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.

Dalam penelitian ini subjek yang menjadi informan/responden adalah orang yang dapat memberikan jawaban dan pandangannya tentang situasi dan kondisi serta menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data-data yang relevan dan kompeten (dapat dipertanggungjawabkan) dengan masalah penelitian berupa data keterangan maupun kata-kata yang bermakna.

Menurut Silalahi (2009:272-273), bahwa pemilihan *purposive* yang kadang-kadang disebut sebagai *judgement*, merupakan pemilihan subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh

karena itu menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Mereka dipilih karena dipercaya mewakili satu keseluruhan tertentu.

Pada penelitian ini sebagai sumber data dan informan/responden adalah dari PNS Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur, Manajemen PT. Agro Mandiri Sukses, Manajemen PT. Borneo Subur Semesta, Manajemen PT. Ciliandry Anky Abadi, Manajemen PT. Heroes Green Energy, Manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki, Manajemen PT. Tirta Madu, Manajemen PT. Bhadra Cemerlang, Manajemen PT. Borneo Ketapang Indah, Manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi, Manajemen PT. Ketapang Subur Lestari, Manajemen PT. Sandabi Indah Lestari, Manajemen PT. Mitra Jaya Agro Palm, Manajemen PTP. Nusantara XIII (PIR-SUSI), Manajemen PT. Sawit Graha Manunggal, dan perwakilan masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur.

Daftar narasumber sebagai responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Jumlah Narasumber sebagai Responden dalam Penelitian.

No.	Responden	Jumlah
1.	Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan)	3
2.	Manajemen PT. Agro Mandiri Sukses	1
3.	Manajemen PT. Borneo Subur Semesta	1
4.	Manajemen PT. Ciliandry Anky Abadi	1
5.	Manajemen PT. Heroes Green Energy	1
6.	Manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki	1
7.	Manajemen PT. Tirta Madu	1
8.	Manajemen PT. Bhadra Cemerlang	1
9.	Manajemen PT. Borneo Ketapang Indah	1

10.	Manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi	1
11.	Manajemen PT. Ketapang Subur Lestari	1
12.	Manajemen PT. Sandabi Indah Lestari	1
13.	Manajemen PT. Mitra Jaya Agro Palm	1
14.	Manajemen PTP. Nusantara XIII (PIR-SUSI)	1
15.	Manajemen PT. Sawit Graha Manunggal	1
16.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses	1
17.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Subur Semesta	1
18.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Ciliandry Anky Abadi	1
19.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy	1
20.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tamiyang Sumber Rejeki	1
21.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tirta Madu	1
22.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang	1
23.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah	1
24.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Indopenta Sejahtera Abadi	1
25.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Ketapang Subur Lestari	1
26.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Sandabi Indah Lestari	1
27.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Mitra Jaya Agro Palm	1
28.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PTP. Nusantara XIII (PIR-SUSI)	1
29.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal	1
	Total Responden	31

C. Instrumen Penelitian

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2011:306).

Instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasil yang lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini bentuk instrumen yang digunakan adalah berupa angket atau kuisisioner. Menurut Arikunto (2010: 194). angket atau kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui.

Sedangkan menurut Sugiyono (2007: 157), kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Berdasarkan definisi di atas, maka instrumen penelitian/alat yang digunakan adalah berupa wawancara terhadap responden dengan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan studi dokumentasi dan observasi di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- 1. Wawancara**, adalah suatu komunikasi dalam menganalisis implementasi kebijakan. Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dengan memberikan pertanyaan tertulis (angket/kuisisioner) kepada responden untuk dijawab sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang sejauhmana pelaksanaan pola kemitraan dalam pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Wawancara ini dilakukan terhadap semua informan/responden.
- 2. Observasi**, yaitu mengamati langsung ke lokasi tempat pembangunan kebun masyarakat (plasma). Waktu observasi dilaksanakan bersamaan pada waktu wawancara dengan responden.

3. Studi Dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan implementasi program. Dokumen tersebut yaitu berupa Surat Keputusan Penetapan Petani Plasma.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dimana data itu disederhanakan dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun dan Efendi, 1987:231). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada objek penelitian yang ada relevansinya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

2. Reduksi/Pengolahan Data

Dimana pada tahap ini data yang diperoleh di lapangan diolah dan dituangkan dalam bentuk uraian/laporan terinci dan lengkap. Dalam kegiatan ini merupakan suatu bentuk analisis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Dimana dalam penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan suatu gambaran dan pengertian yang mendalam dan terinci mengenai suatu masalah sehingga akan melahirkan suatu kesimpulan yang induktif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, jika ditetapkan secara spesifik maka dapat merupakan data yang terukur.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Barito Timur

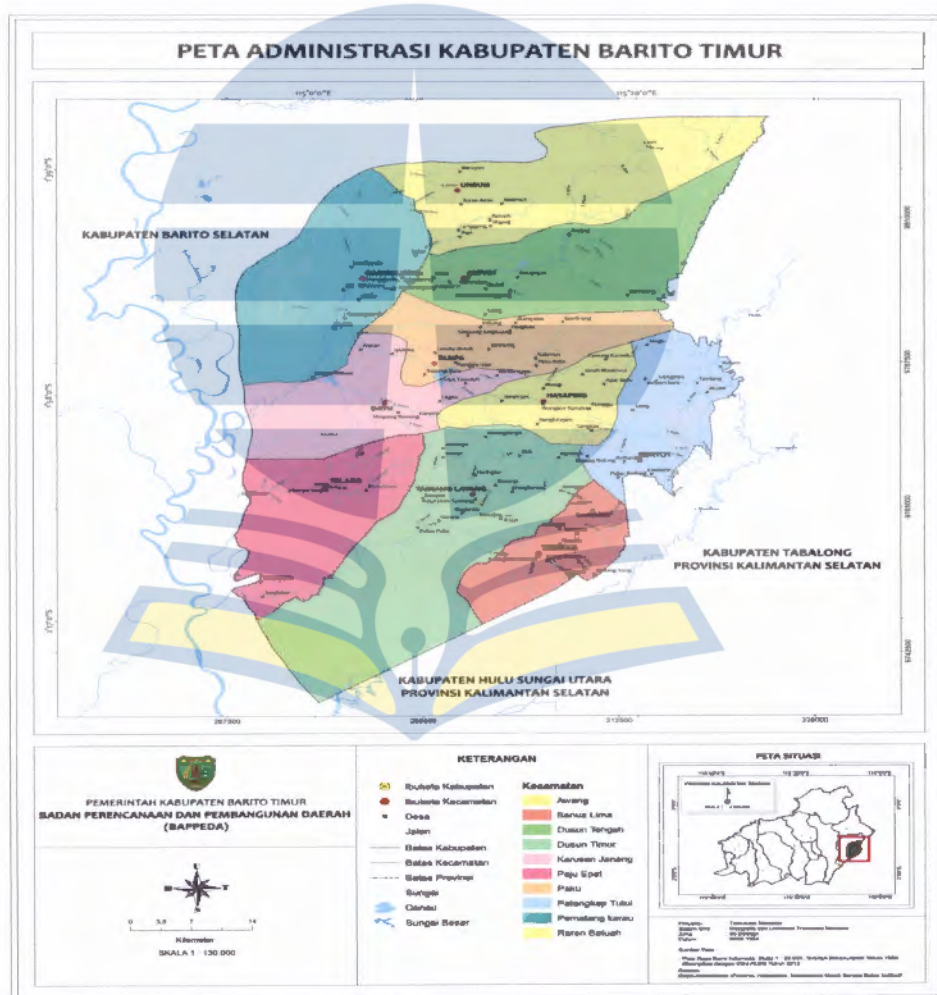
Kabupaten Barito Timur yang beribukota di Tamiang Layang terletak antara $1^{\circ}2'$ lintang utara dan $2^{\circ}5'$ lintang selatan, 114° dan 115° bujur timur. Kabupaten Barito Timur diapit oleh Kabupaten Barito Selatan di sebelah utara, di sebelah timur dengan sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, di sebelah selatan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan. Luas wilayah Kabupaten Barito Timur secara keseluruhan sebesar 3.834 km^2 yang meliputi 10 kecamatan dengan Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Paju Epat merupakan kecamatan terluas, masing-masing $867,7 \text{ km}^2$ dan $664,3 \text{ km}^2$ yang bila dijumlahkan luasnya mencapai 39,96% dari seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur (Barito Timur Dalam Angka 2018, BPS Kabupaten Barito Timur).

Penduduk Kabupaten Barito Timur tahun 2017 adalah sebanyak 120.254 jiwa, terdiri atas 51,53% laki-laki dan 48,47% perempuan dengan kepadatan penduduk yang tergolong jarang, yakni sekitar 31-32 jiwa per km^2 . Jumlah Rumah Tangga tahun 2017 sebanyak 31.625 rumah tangga yang tersebar di 10 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Dusun Timur dengan penduduk 32.394 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Dusun Tengah dengan kepadatan 71-72 jiwa/ km^2 . Sedangkan kecamatan dengan jumlah dan

kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Paju Epat dengan jumlah penduduk 4.976 jiwa dan kepadatan penduduk 7 jiwa/km².

Berdasarkan lapangan usaha, penduduk Barito Timur tertinggi bekerja pada sektor pertanian yaitu berjumlah 34.584 orang, kemudian diikuti oleh sektor jasa, perdagangan, hotel dan restoran. (Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2018, BPS Kabupaten Barito Timur).

Peta wilayah Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :



Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Barito Timur (Sumber : Peta RTRWK Barito Timur Tabun 2014-2034).

B. Perkembangan Usaha Perkebunan di Kabupaten Barito Timur

Perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Barito Timur berjumlah 14 perusahaan. Data Izin Perusahaan Perkebunan sampai dengan Juli 2018 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur Bidang Perkebunan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

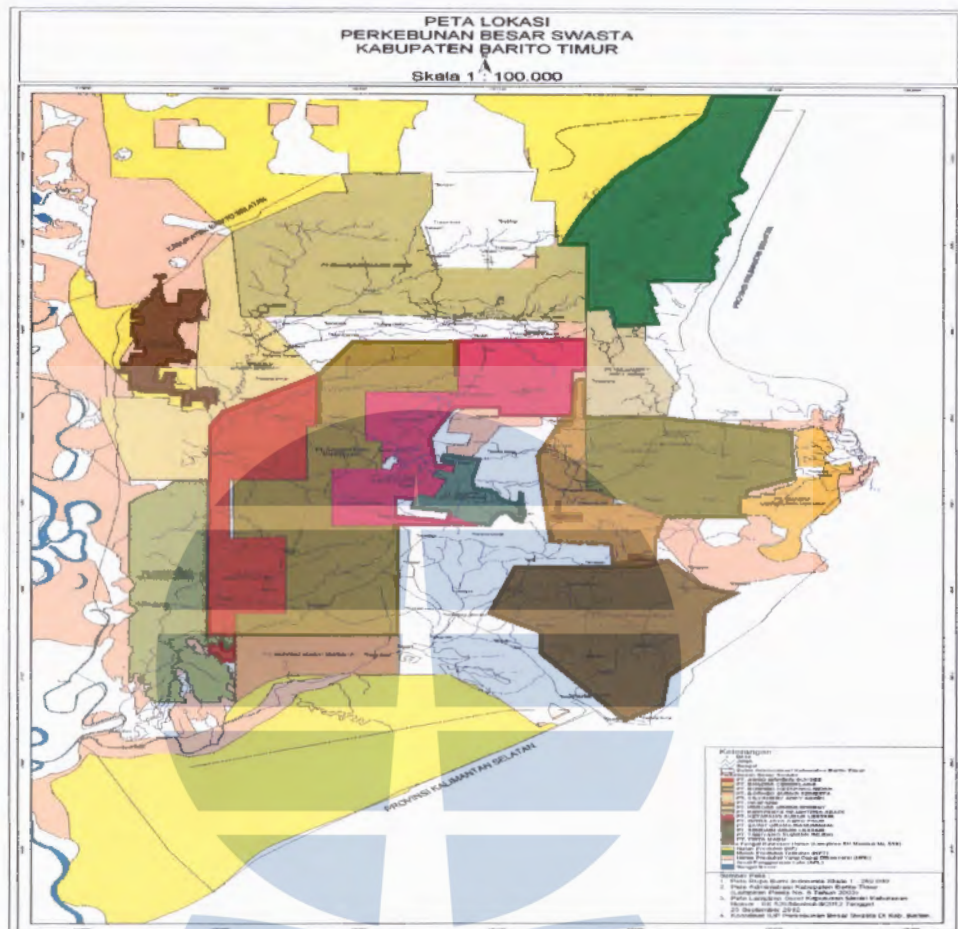
Tabel 3. Data Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Barito Timur Sampai Dengan Juli 2018

No.	Nama Perusahaan	SK Izin Usaha Perkebunan (IUP)		SK Perubahan Luas Lahan		SK Hak Guna Usaha (HGU)	
		No & Tgl	Luas (Ha) & Pemberi Izin	No & Tgl	Luas (Ha) & Pemberi Izin	No & Tgl	Luas (Ha) & Pemberi Izin
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PT. Agro Mandiri Sukses	387 Tahun 2009 13-8-2009	14.363 Bupati Barito Timur				
2.	PT. Borneo Subur Semesta	258 Tahun 2012 27-6-2012	6.000 Bupati Barito Timur				
3.	PT. Ciliandry Anky Abadi	508 Tahun 2009 27-6-2012	18.256 Bupati Barito Timur	387 Tahun 2015 06-11-2015	3.283 Bupati Barito Timur		
4.	PT. Heroes Green Energy	342 Tahun 2009 24-6-2009	14.900 Bupati Barito Timur	388 Tahun 2015 06-11-2015	3.400 Bupati Barito Timur		
5.	PT. Tamiyang Sumber Rejeki	283 Tahun 2012 4-7-2012	20.000 Bupati Barito Timur				
6.	PT. Tirta Madu	509 Tahun 2009 30-9-2009	15.200 Bupati Barito Timur	389 Tahun 2015 06-11-2015	5.409 Bupati Barito Timur		

7.	PT. Bhadra Cemerlang	187 Tahun 2006 16-6-2006	6.168 Bupati Barito Timur				
8.	PT. Borneo Ketapang Indah	515 Tahun 2009 4-12-2009	38.810 Bupati Barito Timur	390 Tahun 2015 06-11-2015	10.600 Bupati Barito Timur		
9.	PT. Indopenta Sejahtera Abadi	389 Tahun 2009 13-8-2009	16.455 Bupati Barito Timur				
10.	PT. Ketapang Subur Lestari	341 Tahun 2009 24-6-2009	21.000 Bupati Barito Timur			90/HGU/ KEM- ATR/BPN/ 2017 25-8-2017	3.573,110 Ka. BPN
11.	PT. Sandabi Indah Lestari	366 Tahun 2011 4-11-2011	5.306,112 Bupati Barito Timur			120/HGU/ BPN/2005 23-12- 2005 25/HGU/2/ BPN/95 12-4-1995	2.000,112 3.306 Ka. BPN
12.	PT. Mitra Jaya Agro Palm	168 Tahun 2005 12-6-2005 4 Tahun 2012 12-1-2012	12.500 4.822 Bupati Barito Timur				
13.	PTP. Nusantara XIII (PIR-SUS I)	187/Mentan/ VI/80 6-1-1980	10.500 Bupati Barito Timur			64/HGU/ DA/85 16-12- 1985	3.760
14.	PT. Sawit Graha Manunggal	381 Tahun 2011 23-11-2011	17.453 Bupati Barito Timur	383 Tahun 2017 22-12-2017	17.467,23 Bupati Barito Timur	150/HGU/ BPNRI/ 2014 15-10- 2014	17.467,23

Sumber : Data Perkebunan Besar Swasta Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur Tahun 2018

Peta Izin Usaha Perkebunan Besar di Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada Gambar 3 berikut :



Gambar 3. Peta Izin Usaha Perkebunan Besar di Kabupaten Barito Timur (Sumber : Peta Perkebunan Besar Swasta Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur Tahun 2018).

C. Hasil

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kemitraan dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) yang diterapkan perusahaan perkebunan kepada masyarakat, dan untuk mengetahui keterlibatan pemerintah dalam pola

kemitraan pembangunan kebun masyarakat (plasma) antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

Sehubungan dengan tujuan tersebut telah dibangun suatu rancangan dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan instrumen melalui kuisisioner, observasi maupun studi dokumentasi.

Pengumpulan data yang telah dilakukan untuk penelitian implementasi kebijakan publik dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Timur, baik yang didapat dari kuisisioner, observasi, maupun studi dokumentasi, disampaikan hasil dan temuan sebagai berikut :

1. Hasil Wawancara

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang bersifat umum, yaitu pedoman wawancara yang mencantumkan isu-isu yang harus diliput. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas (Poerwandari, 2007).

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dengan memberikan pertanyaan tertulis (angket/kuisisioner) kepada responden untuk dijawab sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang sejauhmana pelaksanaan pola kemitraan dalam pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Wawancara ini dilakukan terhadap semua responden.

Faktor-faktor atau aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Timur, terdiri dari 6 faktor atau aspek yaitu 1). Standar dan sasaran kebijakan/ukuran; 2). Sumber daya; 3). Karakteristik badan pelaksana; 4). Kondisi sosial, ekonomi dan politik; 5). Komunikasi antar badan pelaksana; dan 6). Disposisi/Sikap para pelaksana. Dengan hasil didapat sebagai berikut :

a. Sasaran dan Kebijakan dari Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No.1), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Penerapan pembangunan kebun masyarakat (plasma) 20% dari areal yang diusahakannya telah berjalan semenjak diterbitkannya Permentan 98/2013. Dan untuk Kabupaten Barito Timur dimulai pada tahun 2013 di PT. Sawit Graha Manunggal, disusul kemitraan PT. Bhadra Cemerlang tahun 2014, dan pembangunan plasma di PT. Indopenta Sejahtera Abadi pada tahun 2016, dan PT. Borneo Ketapang Indah, PT. Ketapang Subur Lestari, PT. Heroes Green Energy pada tahun 2017.”

“Pola kemitraan pembangunan kebun plasma bersifat wajib dan telah berjalan sampai dengan saat ini, yang disebut dengan pola inti dan plasma. Kemitraan lainnya yang dilaksanakan PBS bersama masyarakat sekitar antara lain kerjasama transportasi, kerjasama tenaga kerja.”

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 2), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Penerapan plasma 20% telah direalisasi oleh PBS yang perolehan IUP setelah tahun 2007. Namun PBS yang IUP sebelum 2007 juga telah melaksanakan kemitraan masyarakat.”

“Pola yang dilaksanakan PBS yaitu pola inti dan plasma, pola kerjasama transportasi/angkutan TBS dan CPO, untuk pembangunan plasma yang terkendala lahan PBS agar dapat membangun kebun masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 3), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Penerapan plasma 20% telah direalisasikan oleh beberapa perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur.”

“Pola kemitraan yang dilaksanakan perusahaan perkebunan adalah pola inti dan plasma. Di mana areal 80% manfaat untuk kebun inti/untuk perusahaan, dan 20% manfaat untuk plasma/untuk masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 4), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Menurut saya hal tersebut sangat bagus untuk kepentingan masyarakat, dan pemerintah sudah menerapkan dalam kebijakannya.”

“Pola kemitraan tersebut sudah terlaksana dan polanya dalam bentuk koperasi di mana pengurus, pengawasnya, dan anggotanya sepenuhnya dari masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 5), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Menurut saya sudah berjalan dengan lancar dan sesuai aturan.”

“Pola kemitraan sudah terlaksana dan tepat sasaran.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Borneo Subur Semesta (Narasumber No. 6), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Saya setuju dengan pola ini, tetapi perlu penambahan persentasenya dari lahan yang diusahakan seperti \pm 25% - 30%.”

“Pola kemitraan ini belum berjalan sebagaimana mestinya karena ada sebagian dari anggota masyarakat yang menganggap merugikan mereka. Dan point ini masyarakat Barito Timur belum terbiasa dengan pola kerja perkebunan kelapa sawit.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Borneo Subur Semesta (Narasumber No. 7), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Saling menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur dengan adanya pola 20% dari luasan yang dibebaskan masyarakat.”

“Dengan adanya plasma, masyarakat bisa merasakan hasil dari kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat, yaitu hasil dari pola kemitraan 20% milik masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Ciliandry Anky Abadi (Narasumber No. 8), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Harus diimplementasikan/dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Perkebunan.”

“Pola kemitraan yang sesuai peraturan adalah 80% untuk inti dan 20% untuk plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ciliandry Anky Abadi (Narasumber No. 9), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Masih belum semua perusahaan menerapkan.”

“Masyarakat memberi lahan kepada perusahaan dan mengharapkan pengembalian lahan sebanyak 20% seperti peraturan pemerintah/Undang-Undangnya.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 10), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Masih kurang, akan lebih baik persentasenya berkisar 20% -30%.”

“Pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada masyarakat yang kurang paham dan peduli.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 11), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Sudah sesuai dengan aturan pemerintah.”

“Sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditanda tangan.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 12), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Kebijakan 20% plasma sudah diterapkan namun masih belum 100% terlaksana, karena terkendala pembebasan lahan dan mengikuti pembangunan pola kebun inti.”

“Pelaksanaan pembangunan kebun plasma 20% dari kebun inti telah berjalan, disamping itu pola kemitraan lainnya yang diperoleh masyarakat sekitar adalah angkutan dan tenaga kerja. Hal itu nanti dapat kami terapkan dikemudian hari.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 13), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Implementasi kebijakan plasma 20% sangat diharapkan oleh masyarakat sekitar PT. TSR.”

“Pola kemitraan melalui kebun plasma 20% sangat diperlukan. Pola kemitraan yang disebutkan sebaiknya dalam berbagai hal. Misalnya kebun inti-plasma, angkutan, tenaga kerja, bantuan pengolahan lahan dan lain-lain.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Tirta Madu (Narasumber No. 14), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Perusahaan berkewajiban membangun kebun masyarakat (plasma) dengan luasan 20% dari luas areal Izin Usaha Perkebunan.”

“Masyarakat bersedia menyerahkan lahannya untuk dibangun kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan 80:20.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Tirta Madu (Narasumber No. 15), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Baik, tinggal pemerintah meningkatkan lagi.”

“Untuk pelaksanaan sudah bagus, tinggal pemerintah mengawasi dan menjamin.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 16), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Menurut saya implementasi pembangunan kebun plasma 20% sangat baik untuk mensejahterakan masyarakat sekitar kebun perusahaan. Dan PT. Bhadra Cemerlang mendukung kebijakan dimaksud dengan menjalankan program-program kemitraan pembangunan kebun masyarakat dengan komoditi karet dan sawit.”

“Pola kemitraan di PT. Bhadra Cemerlang telah dilaksanakan dengan bermitra dengan kelompok tani untuk program hibit karet dan pembangunan kebun sawit masyarakat serta pola kemitraan lainnya di bidang transportasi/angkutan.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 17), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tapi khusus di wilayah kerja PT. Bhadra Cemerlang tidak berjalan dengan baik karena bentuk pembangunan kebun plasma tidak dilaksanakan, hanya berupa pola kemitraan antara masyarakat dengan PBS.”

“Untuk PT. Bhadra Cemerlang masih belum berjalan karena pola kemitraan hanya berupa kerjasama pengelolaan kebun karet masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 18), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Secara umum sudah memenuhi ketentuan yang ada, namun masih ada perbaikan/langkah PEMDA bagi yang belum melakukannya.”

“Pola kemitraan atau kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku 20% masyarakat dan 80% perusahaan dari lahan yang diserahkan dan diusahakan, untuk lahan plasma diwadahi dengan koperasi.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 19), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Sudah berjalan dengan baik, karena setiap PBS khususnya PT. BKI sudah merealisasikan plasma ke masyarakat.”

“Pola plasma yang dilakukan oleh perusahaan sudah jelas sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 80% inti dan 20% plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 20), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Menurut saya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai aturan yaitu 20% dari areal.”

“Pola kemitraan sudah terlaksana, yang mana penerima plasma yaitu pemilik lahan adalah masyarakat yang melakukan pembebasan lahannya.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 21), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Menurut saya bagus penerapannya dan bisa membantu perekonomian kedepannya.”

“Berjalan dengan baik dan dikelola oleh masyarakatnya langsung.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Ketapang Subur Lestari (Narasumber No. 22), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Sudah sesuai dengan kewajiban perusahaan.”

“Pelaksanaan kerjasamanya adalah pengelolaan kebun diserahkan kepada perusahaan, pemantauan dan pengawasan secara bersama-sama yang mana plasma diwadahi oleh koperasi.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ketapang Subur Lestari (Narasumber No. 23), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Berjalan baik, PT. KSL sudah merealisasikan pembangunan plasma tahap 1.”

“Pola kemitraan adalah 80% untuk inti dan 20% untuk masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Sandabi Indah Lestari (Narasumber No. 24), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Sudah sesuai dengan aturan/perundang-undangan yang berlaku dan penerapan serta prakteknya sudah berjalan.”

“Sangat baik serta sangat memberikan dampak positif untuk menambah penghasilan keluarga dan masyarakat yang sudah menyerahkan lahannya, artinya tidak 100% kehilangan hak atas penyerahan lahannya kepada perusahaan.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sandabi Indah Lestari (Narasumber No. 25), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Sudah sesuai dengan aturan pemerintah.”

“Sudah berjalan sesuai dengan aturan dan sudah ada kerjasama yang baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Mitra Jaya Agro Palm (Narasumber No. 26), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Sebaiknya penerapan plasma 20% harus direalisasikan karena sudah tercantum dalam Permentan yang merupakan hak masyarakat.”

“Pola kerjasama yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, dimana antara PBS dan masyarakat saling memberikan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan diantaranya seperti pola inti dan plasma, pola kemitraan/budidaya tanaman karet masyarakat, pola kerjasama transportasi, pola kerjasama tenaga kerja.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Mitra Jaya Agro Palm (Narasumber No. 27), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Sebaiknya pembangunan kebun masyarakat/plasma bisa direalisasikan sesuai aturan yang berlaku.”

“Sampai saat ini pola kemitraan PBS khususnya di PT. MJAP masih belum direalisasikan akan tetapi pola kemitraan yang dilakukan berupa kerjasama angkutan TBS.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PTP. Nusantara XIII (Narasumber No. 29), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Sudah berjalan dan direalisasikan oleh perusahaan perkebunan terutama di areal PTPN XIII.”

“Sudah direalisasikan perusahaan perkebunan 100% dan masyarakat sudah merasakan hasilnya.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 30), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Sudah berjalan sesuai peraturan berlaku.”

“Pola 80% kebun inti dan 20% plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 31), terkait sasaran dan kebijakan dari pembangunan kebun masyarakat :

“Sudah berjalan dengan baik, karena setiap PBS khususnya PT. SGM sudah merealisasikan plasma ke masyarakat sekitar, walaupun dikhususkan pada para pemilik tanah yang membebaskan ke PT. SGM sebanyak 20% dari areal yang dibebaskan.”

“Pola yang dilaksanakan sudah jelas karena pada dasarnya memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat khususnya di sekitar kebun. Dimana pola yang dilaksanakan yaitu pola 20% kebun kemitraan untuk masyarakat, pola kemitraan penyediaan tenaga kerja di persemaian maupun di lokasi kebun, pola kemitraan dalam hal angkutan buah/TBS, tanah.”

b. Sumber Daya

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 1), terkait sumber daya :

“Sejauh ini keterlibatan masyarakat adalah menyerahkan lahan kepada PBS untuk menjadi kebun kelapa sawit; dan 20% dari lahan yang

diserahkan tersebut akan menjadi kebun plasma. Sedangkan keterlibatan masyarakat untuk mengolah lahan kebun plasmanya untuk mengurangi beban operasional masih belum terlaksana.”

“Secara finansial, perusahaan perkebunan mampu untuk membiayai pembangunan kebun plasma. Dan masyarakat penerima plasma akan membayar kredit dari hasil penjualan TBS plasma sesuai kesepakatan bersama.”

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 2), terkait sumber daya :

“Petani/masyarakat menyerahkan lahan, PBS membangun kebun plasma.”

“PBS membiayai seluruh kebun plasma dan masyarakat membayar kredit dari hasil penjualan TBS dengan kesepakatan bersama.”

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 3), terkait sumber daya :

“Keterlibatan masyarakat sejauh ini hanya sebatas menyerahkan lahan kepada perusahaan perkebunan dan kebun plasma dikelola oleh perusahaan perkebunan dengan hasil yang dibagi.”

“Secara finansial, perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur mampu membiayai pembangunan kebun masyarakat(plasma).”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 4), terkait sumber daya :

“Pola kemitraan sepenuhnya melibatkan masyarakat karena badan hukumnya adalah koperasi.”

“Karena pembangunan kebun plasma adalah peraturan dari pemerintah, jadi perusahaan harus support penuh dan tidak membedakan dengan kebun inti untuk perawatannya.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 5), terkait sumber daya :

“Sepengetahuan saya banyak masyarakat sekitar yang telah menjadi karyawan pada kebun plasma.”

“Menurut saya secara finansial/keuangan perusahaan cukup besar dan cukup memadai hanya untuk membangun kebun plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Borneo Subur

Semesta (Narasumber No. 6), terkait sumber daya :

“Pada saat ini yang banyak terlibat dalam pembangunan kebun adalah masyarakat kelas bawah, yang pendidikannya rata-rata SD.”

“Dana perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Barito Timur ini rata-rata mempunyai modal yang kuat.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar

PT. Borneo Subur Semesta (Narasumber No. 7), terkait sumber daya :

“Menjaga rasa kebersamaan di dalam melaksanakan tugas yang ditentukan oleh pihak perusahaan.”

“Sesuai dengan kesepakatan awal pembiayaan plasma masyarakat sampai berhasil.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Ciliandry Anky

Abadi (Narasumber No. 8), terkait sumber daya :

“Masyarakat menyerahkan lahan untuk perusahaan perkebunan dan 20% lahan yang diserahkan akan dijadikan plasma.”

“Karena CAA Group menaungi 6 perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur, maka pembiayaan secara bergantian.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar

PT. Ciliandry Anky Abadi (Narasumber No. 9), terkait sumber daya :

“Masyarakat belum dilibatkan dalam pembangunan kebun plasma.”

“Perusahaan sangat mampu membangun kebun plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Heroes Green

Energy (Narasumber No. 10), terkait sumber daya

“Masyarakat cukup dilibatkan, baik untuk tenaga kerja kasar maupun dalam pekerjaan proyek-proyek.”

“Kemampuan perusahaan dalam penyiapan dana cukup.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 11), terkait sumber daya :

“Sudah ikut terlibat terutama penyerapan tenaga kerja.”

“Cukup kuat.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 12), terkait sumber daya :

“Masyarakat sekitar cukup terlibat dalam pembangunan kebun plasma, namun disini PT. TSR belum memulai karena terkendala pembebasan tanah dari masyarakat.”

“Secara finansial perusahaan akan mampu membiayai pembangunan kebun inti bersamaan dengan kebun plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 13), terkait sumber daya :

“Masyarakat sekitar wajib terlibat dalam pembangunan kebun plasma baik dari sisi lokasi, produksi dan angka kredit, yang nantinya secara terbuka diinformasikan PT. TSR kelak.”

“Perusahaan berinvestasi pastilah telah memiliki finansial yang memadai, baik untuk pembangunan kebun inti dan plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Tirta Madu (Narasumber No. 14), terkait sumber daya :

“Pemilik kebun plasma bersedia dan akan ikut bergabung dengan koperasi (sebagai wadah dari anggota pemilik kebun plasma).”

“Baik, adanya kerjasama antara perusahaan dengan pihak pembiayaan lainnya.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Tirta Madu (Narasumber No. 15), terkait sumber daya :

“Sangat dilibatkan, sering ikut rapat.”

“Finansial sangat kuat, jalan terus.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 16), terkait sumber daya :

“Keterlibatan masyarakat sekitar perusahaan inti, terlihat pada program kemitraan karet di mana masyarakat sekitar yang menjadi anggota poktan dan masyarakat tersebut yang terlibat langsung dalam pembangunan kebun.”

“PT. BCL secara finansial siap dalam pembiayaan seperti halnya perusahaan ASTRA lainnya, hanya ketersediaan lahan terkadang menjadi faktor penghambat.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 17), terkait sumber daya :

“Masih belum terlalu banyak terlibat masyarakat dalam pembangunan kebun, hanya sebatas tenaga kerja saja.”

“Baik, kadang terkendala keadaan situasi dan kondisi lahan tersebut.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 18), terkait sumber daya :

“Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kebun plasma cukup dominan dalam segala hal, misal pemantauan tanaman dan perawatan.”

“Dibiaya langsung untuk tahap awal oleh perusahaan setelah kebun terbangun, baru melibatkan perbankan.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 19), terkait sumber daya :

“Cukup baik dan kooperatif tentang perihal pengawasan dan pembinaan.”

“PT. BKI bisa diandalkan dalam pembangunan kebun plasma masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Indopenta Sejahtera

Abadi (Narasumber No. 20), terkait sumber daya :

“Sepengetahuan saya keterlibatan masyarakat sekitar adalah ikut serta dalam pengelolaan kebun plasma yaitu dengan menjadi karyawan pada kebun plasma tersebut.”

“Menurut saya finansial dana perusahaan yang dikucurkan cukup besar dan kemampuan finansial cukup bisa membangun kebun dengan baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar

PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 21), terkait sumber daya :

“Menurut saya sejauh ini keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan plasma sangat baik, salah satunya menjadi karyawan plasma.”

“Menurut saya perusahaan terus mendukung penuh tidak membedakan dengan kebun yang lain untuk perawatannya.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Ketapang Subur

Lestari (Narasumber No. 22), terkait sumber daya :

“Sangat baik dan menyambutnya dengan memberikan dukungan.”

“Bisa diandalkan, PT. KSL membangun lebih dulu kebun plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar

PT. Ketapang Subur Lestari (Narasumber No. 23), terkait sumber daya :

“Masyarakat diikutsertakan dalam suatu wadah koperasi penerima manfaat plasma.”

“Sangat mampu.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Sandabi Indah

Lestari (Narasumber No. 24), terkait sumber daya :

“Sejauh ini berdasarkan pengamatan kami perusahaan sangat memberikan keleluasaan untuk masyarakat agar bisa ambil bagian dalam plasma khususnya bagi masyarakat yang sudah menyerahkan lahannya.”

“Sangat mampu serta mapan dan mewah.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar

PT. Sandabi Indah Lestari (Narasumber No. 25), terkait sumber daya :

“Pembangunan untuk kebun plasma dengan kebun inti bersama dan melibatkan tenaga kerja lokal, namun belum direalisasi sampai sekarang.”

“Cukup kuat/ada dana yang cukup.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Mitra Jaya Agro

Palm (Narasumber No. 26), terkait sumber daya :

“Petani/masyarakat menyerahkan lahan untuk dibuka menjadi kebun kelapa sawit dan 20% dari lahan yang diserahkan akan menjadi kebun plasma.”

“Sudah cukup baik dan mampu membiayai pembangunan kebun plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar

PT. Mitra Jaya Agro Palm (Narasumber No. 27), terkait sumber daya :

“Keterlibatan masyarakat hanya berupa kerjasama dalam hal penyediaan tenaga kerja dan transportasi, angkutan buah/TBS.”

“Sebenarnya perusahaan mampu membangun kebun plasma tapi terkendala aturan yang masih belum jelas pada saat penerbitan IUP PT. MJAP.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar

PTP. Nusantara XIII (Narasumber No. 29), terkait sumber daya :

“Masyarakat terlibat penuh.”

“Baik sekali.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Sawit Graha

Manunggal (Narasumber No. 30), terkait sumber daya :

“70% sampai dengan 80% terlibat dalam pembangunan kebun plasma dan kepemilikan kebun plasma.”

“Secara finansial kebun PT. SGM sangat membantu karena dari Rp. 250 M, dari cadangan baru terealisasi Rp. 50 M sementara pembangunan kebun memerlukan biaya ± Rp. 123 M.

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 31), terkait sumber daya :

“Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kebun plasma hanya terbatas dalam hal penyediaan tenaga kerja.”

“Kemampuan perusahaan dalam hal biaya pembangunan kebun plasma sangat baik, mengingat keseriusan dalam hal investasi di wilayah Barito Timur”.

c. Karakteristik Badan Pelaksana

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 1), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Keterlibatan pemerintah adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke PBS sesuai petunjuk di dalam Permentan No. 98/2013 dan Perda Kalteng No. 5 Tahun 2010 serta Pergub Kalteng No. 12 Tahun 2014. Dan pemerintah menyampaikan secara rutin melalui surat kedinasan dan teguran terkait pelaksanaan pembangunan kebun plasma.”

“Hubungan dan koordinasi terjalin dengan baik. Hal diketahui dengan rutinnya pihak PBS berkoordinasi ke Pemerintah Daerah dan pihak PBS selalu terbuka terhadap upaya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.”

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 2), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Pemerintah mendorong PBS agar dapat merealisasikan plasma minimal 20%.”

“Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 3), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Pemerintah melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan kepada perusahaan perkebunan terkait kewajiban pembangunan kebun plasma.”

“Hubungan terjalin baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 4), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Bentuk keterlibatan pemerintah yaitu dengan keluarnya kebijakan perihal 20% untuk plasma masyarakat dari areal perusahaan.”

“Bentuk koordinasi perusahaan dengan pemerintah adalah adanya bentuk pelaporan bulanan atau pertriwulan sehingga segala perkembangan perusahaan diketahui oleh pemerintah.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 5), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Keterlibatan pemerintah cukup mendukung penuh dengan dikeluarkannya SK CPCL.”

“Hubungannya berjalan dengan sangat baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Borneo Subur Semesta (Narasumber No. 6), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Keterlibatan pemerintah sudah cukup baik, hanya dalam penetapan kebijaksanaan atau aturan tidak tegas.”

“Cukup baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Borneo Subur Semesta (Narasumber No. 7), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Supaya perekonomian masyarakat desa/kecamatan/ kabupaten bisa semakin membaik dengan adanya perusahaan yang berbentuk pola kemitraan.”

“Hubungan antara perusahaan dengan pemerintah sangat baik mendukung investor yang beroperasi di wilayah kabupaten tersebut.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Ciliandry Anky

Abadi (Narasumber No. 8), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Sangat baik, pemerintah daerah selalu melakukan pembinaan, sosialisasi terkait pembangunan plasma.”

“Sangat baik, perusahaan terbuka dan menerima pembinaan/sosialisasi dari pemerintah daerah.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ciliandry Anky Abadi (Narasumber No. 9), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Pemerintah aktif menyuarakan hak masyarakat untuk menerima 20% kebun plasma kepada perusahaan perkebunan.”

“Perusahaan sangat mampu membangun kebun plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 10), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Pihak pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat.”

“Yang kami rasakan cukup baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 11), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Cukup bagus dan telah ada dukungannya.”

“Baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 12), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Pemerintah sangat mendukung kebijakan ini.”

“Terjalin baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 13), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Sangat aktif mendukung penerapan kebijakan plasma.”

“Terjalin cukup baik untuk tingkat desa sampai kabupaten.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Tirta Madu (Narasumber No. 14), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Cukup aktif.”

“Baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Tirta Madu (Narasumber No. 15), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Untuk pemerintah kurang pembinaan dan pengawasan.”

“Untuk hubungan sudah baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 16), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Pemerintah sangat mendukung implementasi pembangunan kebun masyarakat di sekitar kebun inti PT. BCL yaitu dengan memberikan pelayanan/penerbitan SK CPCI, kemitraan, surat-surat kedinasan terkait kewajiban pembangunan masyarakat.”

“Koordinasi antara pemerintah dengan PT. BCL berjalan dengan baik, dan PT. BCL selalu rutin menyampaikan kemajuan fisik perusahaan berupa laporan rutin.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 17), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Sangat baik, karena Pemda selalu mendorong percepatan pembangunan kebun plasma, sehingga target minimal 20% dari luas inti dapat tercapai.”

“Baik, tetapi kadang terkendala masalah birokrasi sehingga sedikit menghambat koordinasi antar keduanya.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 18), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Cukup baik.”

“Cukup baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 19), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Cukup aktif dalam segala hal pengarahannya, pengawasan dan pembinaan masyarakat dan perusahaan.”

“Ini bukan kapasitas kami, namun secara umum hubungan sangat baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 20), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Keterlibatan pemerintah cukup baik dalam mendukung, ini terbukti dengan dibantunya/dikeluarkannya SK CPCL Tahap 1 dan 2 PT. ISA.”

“Hubungannya berjalan dengan baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 21), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Keterlibatan pemerintah dengan adanya aturan pola kemitraan 20%.”

“Berjalan baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Ketapang Subur Lestari (Narasumber No. 22), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Cukup baik.”

“Cukup baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ketapang Subur Lestari (S Narasumber No. 23), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Sangat baik, pemerintahan daerah berperan serta mendorong perusahaan perkebunan untuk merealisasikan plasma.”

“Baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Sandabi Indah Lestari (Narasumber No. 24), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Sangat aktif serta berperan sesuai dengan fungsinya.”

“Sudah berjalan aktif dan harmonis.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sandabi Indah Lestari (Narasumber No. 25), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Cukup terlibat dengan adanya sosialisasi bersama-sama dengan perusahaan.”

“Cukup baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Mitra Jaya Agro

Palm (Narasumber No. 26), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Pemerintah selalu mendorong agar setiap PBS merealisasikan pembangunan kebun plasma. Pemerintah selalu memberikan pengawasan kepada PBS.”

“Selalu terjalin harmonis dan saling bekerja sama agar terjadi kesinambungan dalam pembangunan kebun.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar

PT. Mitra Jaya Agro Palm (Narasumber No. 27), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Pemerintah selalu mendorong dan memonitoring pembangunan kebun plasma.”

“Sangat baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar

PTP. Nusantara XIII (Narasumber No. 29), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Sangat mendukung karena pemerintah selalu mendorong percepatan pembangunan kebun plasma.”

“Baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Sawit Graha

Manunggal (Narasumber No. 30), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Sangat dominan untuk pengawasan realisasi plasma.”

“Sangat baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar

PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 31), terkait karakteristik badan pelaksana :

“Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan plasma sangat baik, yang dilihat dari peran serta permda dalam hal percepatan pembangunan kebun plasma yang dilakukan dengan sosialisasi dan monitoring ke PBS.”

“Sangat baik, karena PBS sangat merespon positif langkah pemerintah dalam hal merealisasikan pembangunan kebun plasma seiring dengan pembangunan kebun inti.”

d. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 1), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Pihak perusahaan perkebunan sangat jelas telah mengetahui kewajiban pembangunan kebun plasma, karena telah mendapatkan sosialisasi serta surat kedinasan secara rutin. Dan dalam mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan pelaku usaha diwajibkan menyisihkan 20% areal pelepasan untuk kebun plasma.”

“Telah dilaksanakan sosialisasi oleh Pemkab Bartim, yang ditujukan untuk pelaku usaha (PBS), SKPD teknis, DPRD, Camat, Kades, Damang dan perwakilan masyarakat, sosialisasi tersebut antara lain; 1). Tahun 2011 s.d 2013, 2). Sosialisasi Perda Provinsi Kalteng No. 5 Tahun 2011, Tahun 2015 Sosialisasi Pergub Kalteng No. 12 Tahun 2014, 3). Surat-surat kedinasan terkait pembinaan PBS terhadap pembangunan kebun plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 2), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“PBS telah mengetahui dan pemerintah mendorong implementasi plasma untuk masyarakat.”

“Sebelum pengajuan IUP, PBS dijelaskan kewajiban pembangunan plasma minimal 20%. PUP (Penilaian Usaha Perkebunan) adalah salah satu unsur penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan kebun plasma oleh PBS.”

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 3), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Sangat mengetahui karena tertera jelas dalam Izin Usaha Perkebunan yang mereka miliki di mana disebutkan bahwa kewajiban perusahaan adalah menyediakan 20% plasma untuk masyarakat.”

“Ada.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 4), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Mengetahui dan sudah diterapkan.”

“Ada. Sudah ada sosialisasi dan pihak legislatif pun turut melakukan controlling untuk kebijakan tersebut.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 5), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Menurut saya perusahaan perkebunan sangat mengetahui dengan baik program dari pemerintah seluas 20%.”

“Belum ada sosialisasi di desa perihal 20% dari areal yang diusahakan perusahaan.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Borneo Subur Semesta (Narasumber No. 6), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Pasti mengetahui karena ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur.”

“Secara tersendiri dari pemerintah/instansi tidak ada, hanya sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan perusahaan.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Borneo Subur Semesta (Narasumber No. 7), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan kabupaten, dan perusahaan maka luasan 20% masyarakat 80% perusahaan.”

“Ada.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Ciliandry Anky Abadi (Narasumber No. 8), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Mengetahui.”

“Ada.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ciliandry Anky Abadi (Narasumber No. 9), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Mengetahui.”

“Ada.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 10), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Perusahaan cukup mengetahui dengan bukti perusahaan dengan serius membangun kebun masyarakat.”

“Ada, dengan ikut serta dalam rangka sosialisasi bersama pihak perusahaan.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 11), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Mengetahui dengan bukti sudah ada pembangunan kebun plasma.”

“Ada sewaktu masuk perusahaan.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 12), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Sangat mengetahui karena kewajiban plasma sudah tersiar baik di media cetak maupun elektronik bahkan tertuang dalam peraturan pedoman perizinan perkebunan.”

“Ada sosialisasi dan pernah kita ikuti.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 13), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Mengetahui karena PT. TSR telah melaksanakan sosialisasi keberadaan perusahaan tersebut di wilayah kami dan dalam sosialisasinya telah disampaikan terkait kebijakan plasma 20% dari inti.”

“Ada sosialisasi yang dimulai dari diundang Kades kami untuk ikut sosialisasi di Mantawara terkait plasma, kemudian Kades menyampaikan kepada kami melalui pertemuan di Balai Desa.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Tirta Madu (Narasumber No. 14), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Mengetahui.”

“Ada.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Tirta Madu (Narasumber No. 15), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Tahu, sudah sosialisasi.”

“Ada tapi kurang, tidak paham.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 16), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“PT. BCL mengetahui kewajiban pembangunan kebun masyarakat (plasma) 20%. Namun IUP dan HGU PT. BCL telah terbit sebelum tahun 2007, sehingga PT. BCL terkendala masalah ketersediaan lahan. Dan saat ini PT. BCL tetap berkomitmen terhadap kewajiban dimaksud dengan menerapkan kemitraan lainnya.”

“PT. BCL pernah mengikuti sosialisasi dari pemerintah terkait kewajiban plasma. ditahun 2010, 2013 dan 2015, serta surat kedinasan setiap tahun terkait kewajiban pembangunan kebun masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 17), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Mengetahui, karena sebelum investasi dilaksanakan pasti investor sudah memahami langkah dan kewajiban mereka ketika mereka akan berinvestasi.”

“Ada sosialisasi tapi kadang PBS yang lambat merealisasikan hasil dari sosialisasi tersebut.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 18), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Mengetahui.”

“Ada.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 19), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Mengetahui dan ada bukti yaitu plasma yang sudah berjalan.”

“Ada.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 20), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Kami sudah atau telah mengetahui adanya kewajiban pembangunan kebun plasma 20% mulai dari awal pembukaan lahan bahkan kami sosialisasikan dengan masyarakat bersamaan dengan sosialisasi rembuk desa (Pembukaan lahan).”

“Kalo untuk sosialisasi resmi tidak ada tapi secara lisan ada dan secara aturan di Pemkab (Perda).”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 21), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Menurut saya telah mengetahui dan telah diimplementasikan.”

“Untuk di desa belum ada.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Ketapang Subur Lestari (Narasumber No. 22), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Sangat mengetahui.”

“Ada sosialisasi.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ketapang Subur Lestari (Narasumber No. 23), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Sangat mengetahui.”

“Ada.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Sandabi Indah Lestari (Narasumber No. 24), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Ya sangat mengetahui.”

“Ya sudah ada dilakukan bahkan sejak awal perusahaan masuk.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sandabi Indah Lestari (Narasumber No. 25), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Jelas mengetahui dengan bukti adanya pembangunan kebun plasma.”

“Ada.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Mitra Jaya Agro Palm (Narasumber No. 26), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Mengetahui karena sudah tertuang dalam Permentan dan Perda.”

“Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan setiap ada pertemuan antara PBS dan Pemda.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Mitra Jaya Agro Palm (Narasumber No. 27), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Mengetahui karena ada peraturan yang mengharuskan adanya 20% dari kebun inti.”

“Ada.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PTP. Nusantara XIII (Narasumber No. 29), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Mengetahui karena sudah tertuang dalam IUP.”

“Ada melalui Dinas Pertanian.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 30), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Sangat mengetahui .”

“Ada.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 31), terkait komunikasi antar badan pelaksana :

“Mengetahui karena sudah tertuang dalam Permentan dan Perda tentang kewajiban yang harus dipenuhi dalam berinvestasi di suatu daerah khususnya perkebunan kelapa sawit.”

“Ada dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, baik berupa pertemuan PBS dan Pemda maupun melalui surat tertulis.”

e. Disposisi/Sikap Para Pelaksana

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 1), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Perusahaan menanggapi secara positif terhadap kebijakan dimaksud karena dalam hal ini bagi PBS akan menjadi keuntungan, bahwa kebun plasma dapat menjadi pagar hidup terhadap stabilitas sosial di sekitar kebun inti.”

“Masyarakat menyambut baik terhadap pembangunan kebun plasma dan upaya kemitraan lainnya yang diwujudkan oleh PBS.”

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 2), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“PBS merespon baik dan berupaya membangun kebun plasma/kemitraan.”

“Masyarakat menyambut dengan baik atas terbangunnya plasma. Agar PBS meningkatkan kerjasama kemitraan.”

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 3), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Baik, dan memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut.”

“Masyarakat menyambut baik atas terbangunnya kebun masyarakat (plasma) oleh perusahaan perkebunan.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 4), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Perusahaan sangat mendukung pola kebijakan tersebut. Selain itu juga guna menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat.”

“Tanggapan masyarakat sangat positif.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 5), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Menurut saya tanggapan perusahaan sangat positif dan tangan terbuka menyambut kebijakan tersebut.”

“Tanggapan dari kami sebagai masyarakat sangat merespon positif.”
Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Borneo Subur

Semesta (Narasumber No. 6), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Tanggapan perusahaan positif karena saat ini lahan untuk diusahakan pembangunan perkebunan tidak ada lagi karena lahan telah dikuasai oleh masyarakat.”

“Pada umumnya anggota masyarakat masih ragu atas pola ini karena pada umumnya masyarakat Bartim mau instan.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Borneo Subur Semesta (Narasumber No. 7), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Setuju saja.”

“Kami selaku masyarakat sangat mengharapkan dengan adanya pola kemitraan ini.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Ciliandry Anky Abadi (Narasumber No. 8), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Perusahaan perkebunan menerima dengan baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut.”

“Masyarakat sangat menyambut baik program/kebijakan tersebut karena memberi manfaat besar dalam peningkatan penghasilan masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ciliandry Anky Abadi (Narasumber No. 9), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Untuk masyarakat di sekitar PT. CAA belum ada tanggapan dari PT. CAA tentang pembangunan plasma.”

“Masyarakat sangat mengharapkan perusahaan PT. CAA dapat membangun kebun plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Heroes Green

Energy (Narasumber No. 10), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Perusahaan menanggapi dengan positif karena akan mengurangi konflik dengan masyarakat.”

“Ada yang baik ada yang kurang baik, tergantung dari pendidikan dan pengalaman.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 11), terkait disposisi/sikap

para pelaksana :

“Cukup bagus dengan bukti nyata adanya kebun plasma.”

“Positif.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 12), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Perusahaan menyambut baik kebijakan ini sebagai bagian dari pengamanan kebun inti dari masalah sosial dengan masyarakat sekitar.”

“Masyarakat menyambut baik terhadap kebijakan plasma dan terkait pola kemitraan lainnya.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 13), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Tanggapan PT. TSR setahu kami, akan melaksanakan pembangunan kebun plasma bersamaan dengan kebun inti setelah PT. TSR melaksanakan pembebasan lahan/GRTT dari masyarakat.”

“Sejauh dari informasi teman dan keluarga di masyarakat sekitar PT. BKI, PT. SGM, PT. ISA telah menjalankan kebijakan ini dan kami

harapkan untuk PT. TSR dapat segera melaksanakan pembangunan kebun masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Tirta Madu (Narasumber No. 14), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Baik dan mendapat dukungan dari masyarakat.”

“Baik dan terbantu perekonomian masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Tirta Madu (Narasumber No. 15), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Bagus karena perusahaan baik.”

“Masyarakat menerima tapi kurang diberi pemahaman.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 16), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“PT. BCL mendukung sepenuhnya kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma) sehingga hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar tetap terjalin harmonis.”

“Masyarakat menyambut positif kebijakan tersebut, hal ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menegaskan kepada perusahaan perkebunan dalam mewujudkan kemitraan dengan masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 17), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Sangat mendukung karena mereka memiliki kewajiban tersebut.”

“Masyarakat sangat mengharapkan hal tersebut karena itu merupakan bentuk perhatian PBS terhadap masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 18), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Tidak ada masalah, mengikuti ketentuan yang ada.”

“Cukup baik dan menerima.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 19), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Sangat baik dan ada bukti plasma sudah ada.”

“Cukup baik dan tidak ada kendala.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 20), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Tanggapan perusahaan positif dengan tangan terbuka menyambut kebijakan dengan pola kemitraan yang diatur oleh pemerintah.”

“Tanggapan masyarakat merespon positif.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 21), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Sangat mendukung pola kebijakan tersebut.”

“Menurut saya tanggapan positif.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Ketapang Subur Lestari (Narasumber No. 22), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Sangat baik.”

“Sangat baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ketapang Subur Lestari (Narasumber No. 23), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Perusahaan bersedia menyediakan/membuat kebun plasma untuk masyarakat.”

“Menerima dan menyambut baik karena memberi manfaat dalam penambahan penghasilan keluarga.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Sandabi Indah Lestari (Narasumber No. 24), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Harus dilaksanakan walaupun menurut kami agak berat serta harus mengeluarkan biaya lebih.”

“Ya ada yang sangat puas, ada juga yang masih belum puas.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sandabi Indah Lestari (Narasumber No. 25), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Baik dengan bukti adanya kebun plasma di PBS lain dan akan ditiru oleh PT. SIL.”

“Baik.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Mitra Jaya Agro Palm (Narasumber No. 26), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“PBS merespon dengan baik dan sangat mendukung program tersebut.”

“Masyarakat menyambut baik program kemitraan tersebut karena merasa dilibatkan dalam pembangunan kebun dan dapat menambah income.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Mitra Jaya Agro Palm (Narasumber No. 27), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Sangat mendukung tetapi tindakan belum dilaksanakan.”

“Sangat mendukung karena merupakan harapan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan kebun.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PTP. Nusantara XIII (Narasumber No. 29), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Sangat mendukung karena merupakan kewajiban perusahaan perkebunan terhadap masyarakat.”

“Sangat mengharapkan mendapat plasma karena mendapatkan hasil tambahan.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 30), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Sangat mendukung program tersebut untuk keamanan dan menjaga iklim investasi yang kondusif.”

“Antusias.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 31), terkait disposisi/sikap para pelaksana :

“Perusahaan menyambut baik karena itu merupakan kewajiban dalam berinvestasi yaitu meensejahterakan masyarakat salah satunya melalui pola kemitraan yang sudah dituangkan.”

“Cukup senang karena melalui hasil pola kemitraan masyarakat dapat menerima hasil tambahan dari kebun plasma.”

f. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 1), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Sebelum adanya pembangunan kebun masyarakat, pendapatan masyarakat masih tergantung dari mata pencaharian rutin.”

“Sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma), pendapatan masyarakat sekitar perusahaan sebagai anggota plasma, mendapatkan tambahan penghasilan dari sisa penjualan TBS setelah potongan kredit.”

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 2), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Optimis PBS mampu membangun kebun plasma.”

“Ada tambahan pendapatan untuk masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 3), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Sebelum plasma ada, masyarakat masih tergantung pada pendapatan rutin/mata pencaharian rutin seperti tani, dan lain-lain.”

“Setelah adanya plasma, pendapatan masyarakat ada penambahan dari hasil kebun plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 4), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Masyarakat awalnya cuma berkebun, bertani atau nelayan sehingga masih kekurangan.”

“Masyarakat sangat senang karena selain dapat bekerja di perusahaan, mereka juga mendapat kebun plasma guna menunjang hidup mereka.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 5), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Pendapatan masyarakat sekitar sangat pas-pasan.”

“Setelah adanya program pemerintah yang dilakukan atau diterapkan oleh perusahaan perkebunan, pendapatan masyarakat meningkat.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Borneo Subur Semesta (Narasumber No. 6), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Pendapatan masyarakat sebelum masuk perkebunan masih di bawah UMP tetapi setelah perkebunan masuk ekonomi mereka meningkat.”

“Adanya peningkatan pendapatan rata-rata mereka mendapatkan upah saat ini dia atas Rp. 100.000/hari dan tidak tergantung cuaca lagi bagi petani karet.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Borneo Subur Semesta (Narasumber No. 7), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Saling menguntungkan kedua belah pihak masyarakat maupun perusahaan.”

“Sangat menunjang usaha perekonomian kani masyarakat desa.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Ciliandry Anky Abadi (Narasumber No. 8), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Pendapatan masih mengandalkan hasil tanaman karet keluarga.”

“Ada penambahan pendapatan dari hasil kebun plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ciliandry Anky Abadi (Narasumber No. 9), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Masih berharap pada pendapatan petani sebagai petani karet.”

“Sangat bernarap ada penambahan atau peningkatan pendapatan.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 10), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Pendapatan masyarakat masih di bawah UMP karena banyak masyarakat tergantung cuaca.”

“Pendapatan masyarakat makin meningkat dengan adanya perusahaan di sekitar, dan tidak lagi tergantung dari cuaca bagi penoreh karet.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 11), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Masih kurang.”

“Bertambah.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 12), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Masyarakat sekitar PT. TSR lebih didominasi oleh petani karet lokal.”

“Apabila PT. TSR telah membangun kebun inti dan plasma bagi masyarakat sekitar, tentulah masyarakat sekitar akan mendapatkan penghasilan tambahan.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 13), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Pendapatan kami pada saat ini tergantung dari naik turunnya dari harga komoditi karet.”

“Informasi dari keluarga di PT. SGM adanya kebun plasma telah menambah penghasilan mereka.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Tirta Madu (Narasumber No. 14), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Masyarakat masih mengharapkan hasil hutan.”

“Meningkat apabila diterapkan karena adanya lapangan pekerjaan baik dari perusahaan maupun sekitarnya.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Tirta Madu (Narasumber No. 15), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Susah.”

“Sudah mulai dapat uang lebih tetapi dari grup CAA lain yaitu PT. BKJ, untuk PT. Tirta Madu belum. PT. Tirta Madu berada di wilayah desa kami.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 16), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Pendapatan masyarakat sekitar sebelum adanya pembangunan plasma/kemitraan bergantung dari hasil kebun lokal di mana

produksi kebunnya tidak memenuhi standar/volume yang diharapkan belum mencukupi/belum sesuai.”

“Masyarakat sekitar PT. BCL terbantu dengan mendapatkan penyuluhan/pembinaan, bibit unggul, pupuk berkualitas, sehingga hasil kebun masyarakat yang bermitra dengan PT. BCL mampu untuk meningkatkan pendapatan keluarga.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 17), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Masih di bawah dari standart kebutuhan hidup masyarakat, karena mata pencaharian utama dari perkebunan yang sangat dipengaruhi musim.”

“Agak sedikit mendekati kesejahteraan karena masyarakat dapat bekerja di PBS dan mendapatkan hasil tambahan dari kebun plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 18), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Hanya mengandalkan bertani.”

“Ada peningkatan/tambahan penghasilan selain masyarakat sekitar bekerja sebagai karyawan perusahaan tersebut, seiring berjalannya waktu, bertambah usia tanamannya, tentu hasil plasma akan naik juga.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 19), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Kami ada tambahan penghasilan.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 20), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Sepengetahuan saya yaitu sangat pas-pasan setelah adanya kebun plasma ada sedikit perubahan ke lebih baik/meningkat.”

“Setelah adanya kebun plasma, pendapatan masyarakat meningkat.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 21), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Kurang/masih di bawah standar perihal pendapatan tersebut.”

“Pendapatan sudah meningkat.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Ketapang Subur Lestari (Narasumber No. 22), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Ada tambahan penghasilan.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ketapang Subur Lestari (Narasumber No. 23), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Pendapatan dari penghasilan rutin sebagai tani karet.”

“Ada penambahan dari hasil kebun plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Sandabi Indah Lestari (Narasumber No. 24), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Ya ada sedikit meningkat walaupun belum 100%.”

“Yang pasti ada sedikit menambah nilai tambah khususnya ekonomi masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sandabi Indah Lestari (Narasumber No. 25), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Dalam keadaan pas-pasan.”

“Sangat banyak perubahan yang lebih baik jika diterapkan.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT Mitra Jaya Agro Palm (Narasumber No. 26), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Kurang yakin dengan kehadiran PBS apakah mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar PBS.”

“Adanya income/tambahan dari hasil kebun walaupun masih belum sesuai yang diharapkan karena masih merupakan tanaman yang baru menghasilkan.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Mitra Jaya Agro Palm (Narasumber No. 27), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Ragu-ragu apakah kehadiran PBS dapat mensejahterakan masyarakat.”

“Belum memberikan pengaruh yang signifikan bagi perekonomian masyarakat.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PTP. Nusantara XIII (Narasumber No. 29), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Berada di bawah harapan karena bergantung pada sektor perkebunan.”

“Mulai sejahtera karena dapat bekerja di perusahaan perkebunan dan dapat hasil tambahan dari kebun plasma.”

Hasil wawancara peneliti dengan manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 30), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Terbantu dan ada peningkatan.”

“Ada perubahan ke arah perbaikan.”

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 31), terkait kondisi sosial ekonomi :

“Rata-rata pendapatan sebelum adanya pola kemitraan yaitu berada di bawah rata-rata karena masyarakat hanya bergantung dari hasil alam.”

“Setelah adanya kebun plasma/pola kemitraan rata-rata pendapatan sudah ke arah sejahtera karena masyarakat mulai merasakan hasil dari

pola kemitraan walaupun masih kurang dari harapan mengingat usia tanaman yang masih muda.”

2. Hasil Observasi

Peneliti melakukan observasi/mengamati langsung ke lokasi tempat pembangunan kebun masyarakat (plasma). Didapat hasil pengamatan di lapangan bahwa dari 14 perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Barito Timur, ada beberapa perusahaan perkebunan yang telah memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat (plasma).

Dari 14 perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur, yang sudah melakukan pembangunan kebun masyarakat (plasma) didapati hasil bahwa ada perusahaan perkebunan yang sudah merealisasikan pembangunan kebun masyarakat (plasma), meskipun pembangunan kebun masyarakat (plasma) tersebut belum terealisasi secara keseluruhan sesuai target yaitu 20% dari jumlah areal yang diusahakan perusahaan perkebunan.

Hasil observasi/pengamatan terhadap 7 perusahaan perkebunan yang sudah melakukan pembangunan kebun masyarakat (plasma) di Kabupaten Barito Timur, dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini.

Pada areal kebun masyarakat (plasma) PT. Agro Mandiri Sukses terdapat tanaman kelapa sawit, tahun tanam 2017.



Gambar 4. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) yang dibangun PT. Agro Mandiri Sukses.

Pada areal kebun masyarakat (plasma) PT. Heroes Green Energy ini, terdapat tanaman kelapa sawit, tahun tanam 2016.



Gambar 5. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) yang dibangun PT. Heroes Green Energy.

Pada areal kebun masyarakat pola kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Bhadra Cemerlang, terdapat tanaman karet yang ditanam pada lahan masyarakat tahun tanam 2014. Dan terdapat tanaman kelapa sawit yang ditanam pada lahan masyarakat, tahun tanam 2016.



Gambar 6. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) yang dibangun PT. Bhadra Cemerlang.

Pada areal kebun masyarakat (plasma) PT. Borneo Ketapang Indah ini, terdapat tanaman kelapa sawit, tahun tanam 2014 dan 2015.



Gambar 7. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) yang dibangun PT. Borneo Ketapang Indah.

Pada areal kebun masyarakat (plasma) PT. Indopenta Sejahtera Abadi ini, terdapat tanaman kelapa sawit, tahun tanam 2016.



Gambar 8. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) yang dibangun PT. Indopenta Sejahtera Abadi

Pada areal kebun masyarakat (plasma) PT. Ketapang Subur Lestari ini, terdapat tanaman kelapa sawit, tahun tanam 2016.



Gambar 9. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) yang dibangun PT. Ketapang Subur Lestari.

Pada areal kebun masyarakat (plasma) PT. Sawit Graha Manunggal ini, terdapat tanaman kelapa sawit, tahun tanam 2014.



Gambar 10. Foto Kebun Masyarakat (Plasma) yang dibangun PT. Sawit Graha Manunggal.

3. Hasil Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilaksanakan yaitu dengan cara mengumpulkan data, dari arsip atau dokumen penting yang berkaitan dengan implementasi program pembangunan kebun masyarakat (plasma). Dokumen tersebut yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur terkait tentang Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) oleh Perusahaan Perkebunan.

Dokumen terkait pembangunan kebun masyarakat (plasma) melalui pola kemitraan oleh Perusahaan Perkebunan sampai dengan bulan Juli 2018, dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini :

Tabel 4. Dokumen Pembangunan Kebun Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Oleh Perusahaan Perkebunan.

No.	Nama Perusahaan Perkebunan	Luas Areal IUP/HGU (Ha)	Nama Koperasi Kemitraan Plasma	Luas Areal Kebun Kemitraan/ Plasma (Ha)	Jumlah Peserta Penerima Manfaat (Orang/KK)	• No. SK dan Tgl SK • Penerbit :
1	2	3	4	5	6	7
1.	PT. Agro Mandiri Sukses	14.363	Koperasi Plasma Paju Epat Sejahtera Mandiri (Pembangunan Kebun Masyarakat Tahap 1)	42,458	21	Nomor 339 Tahun 2018 Tanggal 23 Juli 2018 Bupati Barito Timur
2.	PT. Heroes Green Energy	3.400	Koperasi Berkat Mupakat (Pembangunan Kebun Masyarakat Tahap 1)	384,20	455	Nomor 133 Tahun 2017 Tanggal 18 April 2017 Bupati Barito Timur
3.	PT. Bhadra Cemerlang	6.168	Kelompok Tani Sejahtera Bersama I, Kelompok Tani Sejahtera Bersama II dan Kelompok Tani Harapan Bersama	147,86	45	Nomor 109 Tahun 2014 Tanggal 14 April 2014 Bupati Barito Timur
			Kelompok Tani Sejahtera Bersama I, Kelompok Tani Sejahtera Bersama II	110	42	Nomor 390 Tahun 2014 Tanggal 22 Des. 2014 Bupati Barito Timur
			Kelompok Tani Sejahtera Bersama	108	43	Nomor 146 Tahun 2016 Tanggal 30 Mei 2016 Bupati Barito Timur
4.	PT. Borneo Ketapang Indah	10.600	Koperasi Mitra Borneo Lestari (Pembangunan Kebun Masyarakat Tahap 1)	249,77	128	Nomor 110 Tahun 2017 Tanggal 6 April 2017 Bupati Barito Timur
			Koperasi Usaha Bina Bersama (Pembangunan Kebun Masyarakat Tahap 1)	577,31	270	Nomor 111 Tahun 2017 Tanggal 6 April 2017 Bupati Barito Timur

5.	PT. Indopenta Sejahtera Abadi	16.455	Koperasi Plasma Paju Epat Sejahtera Mandiri (Pembangunan Kebun Masyarakat Tahap1)	356	112	Nomor 17 Tahun 2016 Tanggal 21 Januari 2016 Bupati Barito Timur
			Koperasi Plasma Paju Epat Sejahtera Mandiri (Pembangunan Kebun Masyarakat Tahap 2)	380,22	142	Nomor 340 Tahun 2018 Tanggal 23 Juli 2018 Bupati Barito Timur
6.	PT. Ketapang Subur Lestari	3.573,110	Koperasi Paku Janang Membangun (Pembangunan Kebun Masyarakat Tahap 1)	372,05	469	Nomor 47 Tahun 2018 Tanggal 26 Januari 2018 Bupati Barito Timur
7.	PT. Sawit Graha Manunggal	17.467,23	Koperasi Bartim Sawit Sejahtera (Pembangunan Kebun Masyarakat Tahap 1)	909,35	580	Nomor 26 Tahun 2013 Tanggal 4 Pebruari 2013 Bupati Barito Timur
			Koperasi Bartim Sawit Sejahtera (Pembangunan Kebun Masyarakat Tahap 2)	1.291,88	969	Nomor 254 Tahun 2017 Tanggal 18 Sept. 2017 Bupati Barito Timur
Jumlah		72.026,34		4.929,098	3.276	

D. Pembahasan

Hasil pengumpulan data dari kuisiner penelitian lapangan terhadap kajian, ada 6 faktor atau aspek yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) dengan Pola Kemitraan Antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Timur, dengan analisis sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran.

Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998), mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur selaku narasumber memberikan jawaban terhadap standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana yaitu sebagai berikut :

“Penerapan pembangunan kebun masyarakat (plasma) 20% dari areal yang diusahakan telah berjalan semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dan untuk Kabupaten Barito Timur dimulai pada tahun 2013 di PT. Sawit Graha Manunggal, disusul kemitraan PT. Bhadra Cemerlang tahun 2014, pembangunan plasma di PT. Indopenta Sejahtera Abadi dan PT. Borneo Ketapang Indah pada tahun 2016, dan PT. Heroes Green Energy pada tahun 2017”.

Terkait pola kemitraan atau kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Pola kemitraan pembangunan kebun plasma bersifat wajib dan telah berjalan sampai dengan saat ini, yang disebut dengan pola inti dan plasma. Kemitraan lainnya yang dilaksanakan perusahaan perkebunan bersama masyarakat sekitar antara lain kerjasama transportasi, kerjasama tenaga kerja.”

Sebagaimana yang disampaikan narasumber di atas bahwa peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu berupa kewajiban perusahaan perkebunan membangun kebun untuk masyarakat (plasma). Kewajiban tersebut termuat

dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 15 yang berbunyi :

“Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP”.

Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Pertanian sebagai narasumber juga menyatakan bahwa :

“Pola kemitraan yang dilaksanakan perusahaan perkebunan adalah pola inti dan plasma. Di mana areal 80% manfaat untuk kebun inti/untuk perusahaan, dan 20% manfaat untuk kebun plasma/untuk masyarakat”.

Standar kebijakan yang digunakan adalah berupa pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Pola kemitraan tersebut yaitu dari 100 % areal yang diusahakan perusahaan perkebunan untuk pembangunan kebun, 20% dari area! kebun tersebut adalah hak masyarakat dan 80% dari areal kebun tersebut adalah hak perusahaan perkebunan. Sasaran dari kebijakan ini adalah perusahaan perkebunan dan masyarakat. Perusahaan perkebunan berkewajiban membangun kebun untuk masyarakat (plasma) sebesar 20% areal yang diusahakan, dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan perkebunan mendapatkan hak memiliki kebun plasma.

Tujuan diberikan plasma ini bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan nilai tambah penghasilan masyarakat setempat. Selain itu tujuan lainnya yang terkandung dalam kebijakan pemerintah ini juga sangat baik untuk para investor atau perusahaan perkebunan karena dengan

terpenuhinya hak masyarakat, secara langsung juga menjaga iklim investasi agar dapat berjalan kondusif.

Disimpulkan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn Kinerja kebijakan atau implementasinya memiliki standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Disini terlihat standar kebijakan yang digunakan sudah ada dan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan pengambilan data melalui wawancara/kuisisioner, observasi lapangan dan studi dokumentasi diketahui bahwa sebagian perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Barito Timur sudah melaksanakan kebijakan pembangunan kebun untuk masyarakat (plasma).

Dari 14 perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Barito Timur, ada 7 perusahaan perkebunan yang sudah menjalankan ketentuan tersebut. Realisasi pembangunan kebun masyarakat dari 7 perusahaan perkebunan tersebut disajikan dalam data berikut ini :

Tabel 11. Data Realisasi Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) oleh 7 (tujuh) Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Barito Timur.

No.	Nama Perusahaan	Luas Areal yang diusahakan (IUP/Perubahan Luas Lahan/HGU) (Ha)	Kewajiban Plasma untuk masyarakat 20% dari Areal yang diusahakan (Ha)	Realisasi Kebun Masyarakat /Plasma (Ha)	Jumlah Peserta Penerima Manfaat (Orang/ KK)	Sisa Kewajiban Pembangunan Kebun Masyarakat /Plasma (Ha)
1.	PT. Agro Mandiri Sukses	14.363	2.872,6	42,458	21	2.830,142
2.	PT. Heroes Green Energy	3.400	680	384,20	455	295,8
3.	PT. Bhada Cemerlang	6.168	1.233,6	365,86	130	867,74
4.	PT. Borneo Ketapang Indah	10.600	2.120	827,08	398	1.292,92
5.	PT. Indopenta Sejahtera Abadi	16.455	3.291	736,22	254	2.554,78
6.	PT. Ketapang Subur Lestari	3.573,110	714,622	372,05	469	342,572
7.	PT. Sawit Giraha Manunggal	17.467,23	3.493,446	2.201,23	1.549	1.292,216
	Jumlah	72.026,34	14.405,268	4.929,098	3.276	9.476,17

Pola kemitraan yang dilaksanakan sebagian sudah sesuai aturan yaitu 80% untuk kebun inti dan 20% untuk kebun masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber dari Manajemen PT. Borneo Ketapang Indah yang menyatakan bahwa :

“Pola kemitraan atau kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku 20% masyarakat dan 80% perusahaan dari lahan yang diserahkan dan diusahakan, untuk lahan plasma diwadahi dengan koperasi”.

Hal ini senada dengan jawaban dari narasumber Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah, yang menyatakan bahwa :

“Pola plasma yang dilakukan perusahaan sudah jelas sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 80% inti dan 20% plasma”.

Dari hasil penelitian lapangan ditemukan dari 14 perusahaan perkebunan ada 7 perusahaan perkebunan yang telah menjalankan ketentuan pembangunan kebun masyarakat (plasma) meskipun belum terealisasi sepenuhnya sebagaimana ketentuan yaitu 20% dari areal yang diusahakan. 7 perusahaan perkebunan tersebut adalah 1). PT. Agro Mandiri Sukses, luas areal yang diusahakannya adalah 14.363 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 2.872,6 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 42,458 hektar, dan sisa kewajiban adalah 2.830,142 hektar. 2). PT. Heroes Green Energy, luas areal yang diusahakannya adalah 3.400 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 680 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 384,20 hektar, dan sisa kewajiban adalah 295,8 hektar. 3). PT. Bhadra Cemerlang luas areal yang diusahakannya adalah 6.168 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang

diusahakan) yaitu 1.233,6 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 365,86 hektar, dan sisa kewajiban adalah 867,74 hektar. 4). PT. Borneo Ketapang Indah, luas areal yang diusahakannya adalah 10.600 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 2.120 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 827,08 hektar, dan sisa kewajiban adalah 1.292,92 hektar. 5). PT. Indopenta Sejahtera Abadi, luas areal yang diusahakannya adalah 16.455 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 3.291 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 736,22 hektar, dan sisa kewajiban adalah 2.554,78 hektar. 6). PT. Ketapang Subur Lestari, luas areal yang diusahakannya adalah 3.573,110 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 714,622 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 372,05 hektar, dan sisa kewajiban adalah 342,572 hektar. 7). PT. Sawit Graha Manunggal, luas areal yang diusahakannya adalah 17.467,23 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 3.493,446 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 2.201,23 hektar, dan sisa kewajiban adalah 1.292,216 hektar.

Selain itu ditemukan juga bahwa ada 7 perusahaan perkebunan yang belum sama sekali menjalankan ketentuan pembangunan kebun masyarakat (plasma). Perusahaan tersebut yaitu PT. Borneo Subur Semesta, PT. Ciliandry Anky Abadi, PT. Tamiyang Sumber Rejeki, PT. Tirta Madu, PT. Sandabi Indah Lestari, PT. Mitra Jaya Agro Palm, dan PTP. Nusantara XIII.

Dari 7 perusahaan perkebunan yang belum merealisasikan pembangunan kebun masyarakat (plasma) ada berbagai sebab seperti yang dikemukakan oleh narasumber dari Manajemen PT. Borneo Subur Semesta yaitu bahwa :

“Pola kemitraan ini belum berjalan sebagaimana mestinya karena ada sebagian dari anggota masyarakat yang menganggap merugikan mereka. Dalam point ini masyarakat Barito Timur belum terbiasa dengan pola kerja perkebunan kelapa sawit”.

Sementara itu dari narasumber perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ciliandry Anky Abadi menyatakan bahwa :

“Masyarakat memberi lahan kepada perusahaan dan mengharapkan pengembalian lahan sebanyak 20% seperti peraturan pemerintah/undang-undangnya”.

Temuan lain yang didapat dari penelitian lapangan yaitu ada 1 perusahaan perkebunan milik negara yaitu PTP. Nusantara XIII yang vakum melakukan pengelolaan usaha perkebunan. PTP. Nusantara XIII ini adalah perusahaan perkebunan komoditi karet. Oleh karena perusahaan vakum, lahan dikuasai penuh oleh masyarakat setempat. Hal ini didapat informasi dari narasumber perwakilan masyarakat di PTP. Nusantara XIII yang menyatakan bahwa :

“Sudah direalisasikan Perusahaan Perkebunan 100% dan masyarakat merasakan hasilnya”.

Dari temuan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa kinerja implementasi kebijakan sudah berjalan cukup baik. Dari 14 perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Barito Timur, ada 7 perusahaan perkebunan yang sudah menyerahkan plasma atau melaksanakan pembangunan kebun untuk masyarakat. Ada respon positif dari

perusahaan perkebunan meskipun belum direalisasi secara keseluruhan. Kebijakan tersebut bersifat realistis bagi pelaksana kebijakan dan dapat diterima oleh masyarakat dan perusahaan perkebunan selaku sasaran kebijakan.

2. Sumber Daya.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Meter dan Van Horn, dalam Widodo 1974) bahwa:

"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program".

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang tertuang dalam isian kuisisioner, terkait sumber daya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 1) menjelaskan bahwa :

"Sejauh ini keterlibatan masyarakat adalah menyerahkan lahan kepada Perusahaan Perkebunan untuk menjadi kebun kelapa sawit, dan 20% dari lahan yang diserahkan tersebut akan menjadi kebun plasma".

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No.2) sehubungan dengan sumber daya, mengenai keterlibatan masyarakat dijelaskan seperti berikut :

“Petani/masyarakat menyerahkan lahan, perusahaan perkebunan membangun kebun plasma”.

Manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 18)

mengenai sumber daya menyatakan bahwa :

“Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kebun plasma cukup dominan dalam segala hal, misal pemantauan tanaman dan perawatan”.

Manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 20)

mengenai sumber daya juga menyatakan bahwa :

“Keterlibatan masyarakat sekitar adalah ikut serta dalam pengelolaan kebun plasma yaitu menjadi karyawan pada kebun plasma tersebut”.

Hal ini juga dinyatakan oleh perwakilan masyarakat di sekitar PT. Indopentas Sejahtera Abadi (Narasumber No. 21) menyatakan bahwa :

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan plasma sangat baik, salah satunya menjadi karyawan plasma”.

Narasumber dari Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ketapang Subur Lestari (Responden No. 23) terkait sumber daya juga menyatakan bahwa :

“Masyarakat diikutsertakan dalam suatu wadah koperasi penerima manfaat plasma”.

Sebagaimana yang dikemukakan beberapa narasumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam kebijakan pemerintah mengenai pembangunan kebun masyarakat (plasma) di sini adalah sumber daya manusia yaitu masyarakat setempat yang berada di sekitar perusahaan perkebunan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah tersebut. Dari hasil penelitian lapangan berupa kuisioner di dapat bahwa peran masyarakat setempat adalah

menyerahkan lahan kepada perusahaan perkebunan untuk dijadikan kebun kelapa sawit, dan 20% dari lahan yang diserahkan tersebut akan menjadi kebun plasma untuk masyarakat.

Selain sumber daya manusia menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya lainnya yang menunjang keberhasilan kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma) adalah kemampuan finansial perusahaan untuk mendanai pembangunan kebun masyarakat (plasma).

Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 3), menyatakan bahwa :

“Secara finansial, perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur mampu membiayai pembangunan kebun masyarakat (plasma)”.

Terkait kemampuan finansial perusahaan perkebunan dalam pembiayaan pembangunan kebun masyarakat (plasma), sebagaimana yang dinyatakan oleh Manajemen PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 10) bahwa :

“Kemampuan perusahaan dalam penyiapan dana cukup”.

Manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 16), terkait kemampuan finansial menyatakan bahwa :

“PT. Bhadra Cemerlang secara finansial siap dalam pembiayaan seperti halnya perusahaan ASTRA lainnya, hanya ketersediaan lahan terkadang menjadi faktor penghambat”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 17), terkait kemampuan finansial perusahaan menyatakan bahwa :

“Baik, kadang terkendala keadaan situasi dan kondisi lahan”.

Manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 18), terkait kemampuan finansial menyatakan bahwa :

“Dibiayai langsung untuk tahap awal oleh perusahaan setelah kebun terbangun, baru melibatkan bank”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah (Narasumber No. 19), terkait kemampuan finansial perusahaan menyatakan bahwa :

“PT. Borneo Ketapang Indah bisa diandalkan dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma)”.

Manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 30), terkait kemampuan finansial pembangunan kebun masyarakat (plasma), menyatakan bahwa :

“Secara finansial kebun PT. Sawit Graha Manunggal sangat membantu karena dari Rp. 250M, dari cadangan baru terealisasi Rp. 50 M sementara pembangunan kebun masyarakat memerlukan biaya ±Rp. 123 M”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 31), terkait kemampuan finansial perusahaan menyatakan bahwa :

“Kemampuan perusahaan dalam hal biaya pembangunan kebun plasma sangat baik, mengingat keseriusan dalam hal investasi di wilayah Kabupaten Barito Timur”.

Dari hasil kuisioner penelitian didapat bahwa sebagian perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Barito Timur secara finansial mampu untuk membiayai pembangunan kebun masyarakat.

Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan perusahaan menandakan bahwa komunikasi antara keduanya sangat baik. Adanya kemampuan finansial perusahaan perkebunan untuk membiayai pembangun

kebun masyarakat (plasma), menandakan bahwa kebijakan tersebut sebagian sudah cukup baik diimplementasikan oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur, meskipun tidak semua perusahaan perkebunan melaksanakan pembangunan kebun untuk masyarakat (plasma) oleh karena keterbatasan dana dan areal. Hal ini sesuai seperti yang ditegaskan Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) bahwa:

”Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Pusat perhatian juga dititik beratkan pada badan pelaksana baik itu organisasi formal maupun organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting diketahui karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para badan pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan badan pelaksana yang demokratis dan persuasif.

Badan pelaksana dalam kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma) adalah pemerintah dan perusahaan perkebunan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur, keterlibatan pemerintah dalam mendukung

implementasi kebijakan publik dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) dengan pola kemitraan di Kabupaten Barito Timur, yaitu bahwa :

“Keterlibatan pemerintah adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke PBS (Perusahaan Besar Swasta) sesuai petunjuk di dalam Permentan 98/2013 dan Perda Kalteng No. 5 Tahun 2010 serta Pergub Kalteng No. 12 Tahun 2014. Dan pemerintah menyampaikan secara rutin melalui surat kedinasan dan teguran terkait pelaksanaan pembangunan kebun plasma”.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 1), terkait hubungan atau koordinasi perusahaan perkebunan dengan pemerintah daerah, menyatakan bahwa :

“Hubungan dan koordinasi terjalin baik. Hal ini diketahui dengan rutusnya pihak perusahaan perkebunan berkoordinasi ke pemerintah daerah dan pihak perusahaan perkebunan selalu terbuka terhadap upaya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah”.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 2), terkait keterlibatan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), menyatakan bahwa :

“Pemerintah mendorong perusahaan perkebunan agar dapat merealisasikan plasma minimal 20%”.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 2), terkait hubungan atau koordinasi perusahaan perkebunan dengan pemerintah daerah, menyatakan bahwa :

“Pemerintah melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan plasma”.

Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 3), terkait keterlibatan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma) menyatakan bahwa :

“Pemerintah melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan kepada perusahaan perkebunan terkait kewajiban pembangunan kebun plasma”.

Kepala Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 3), terkait hubungan atau koordinasi perusahaan perkebunan dengan pemerintah daerah, menyatakan bahwa :

“Hubungan terjalin baik”.

Terkait keterlibatan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 4), menyatakan bahwa :

“Bentuk keterlibatan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan perihal 20% untuk plasma masyarakat dari areal perusahaan”.

Manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 4), terkait hubungan atau koordinasi perusahaan perkebunan dengan pemerintah daerah, menyatakan bahwa :

“Bentuk koordinasi perusahaan dengan pemerintah adalah adanya bentuk pelaporan tahunan atau pertriwulan sehingga segala perkembangan perusahaan diketahui oleh pemerintah”.

Manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 20), terkait keterlibatan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), menyatakan bahwa :

“Keterlibatan pemerintah cukup baik dalam mendukung, ini terbukti dengan dibantunya/dikeluarkannya SK CPCI. Tahap 1 dan 2 PT. Indopenta Sejahtera Abadi”.

Manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 20), terkait hubungan atau koordinasi perusahaan perkebunan dengan pemerintah daerah, menyatakan bahwa :

“Hubungannya berjalan dengan baik”.

Manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 30), terkait keterlibatan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), menyatakan bahwa :

“Sangat dominan untuk pengawasan realisasi plasma”.

Manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 30), terkait hubungan atau koordinasi perusahaan perkebunan dengan pemerintah daerah, menyatakan bahwa :

“Hubungannya sangat baik”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 31), terkait keterlibatan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), menyatakan bahwa :

“Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan plasma sangat baik, yang dilihat dari peran serta pemda dalam hal percepatan pembangunan kebun plasma yang dilakukan dengan sosialisasi dan monitoring ke perusahaan perkebunan”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 31), terkait hubungan atau koordinasi perusahaan perkebunan dengan pemerintah daerah, menyatakan bahwa :

“Hubungan sangat baik, karena perusahaan perkebunan sangat merespon positif langkah pemerintah dalam hal merealisasikan pembangunan kebun plasma seiring dengan pembangunan kebun inti”.

Dari hasil sebagaimana dikemukakan oleh beberapa narasumber di atas diketahui bahwa keterlibatan pemerintah daerah sebagai badan

pelaksana kebijakan sudah cukup baik. Pemerintah melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan kepada perusahaan perkebunan terkait kewajiban pembangunan kebun plasma.

Pemerintah daerah dalam memberikan Izin Usaha Perkebunan secara jelas dan tegas menyampaikan tentang kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat (plasma) seluas 20% dari luas areal yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang tertuang pada pasal 58 tentang kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat yaitu membangun 20%, pola kredit, bagi hasil, 3 tahun sejak HGU dilaporkan. Selain itu juga kewajiban diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada Pasal 15, ayat (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.

Di daerah aturan yang mewajibkan pembangunan kebun masyarakat (plasma) tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, dijelaskan pada Pasal 18, ayat (3) Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh persen)

dari total luas areal kebun yang diusahakan, yang akan dibangun bersamaan dengan pembangunan kebun inti.

Perusahaan perkebunan sebagai badan pelaksana juga mengetahui kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat, dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa ada 7 perusahaan perkebunan melaksanakan kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat. Perusahaan tersebut adalah PT. Agro Mandiri Sukses, PT. Heroes Green Energy, PT. Bhadra Cemerlang, PT. Borneo Ketapang Indah, PT. Indopenta Sejahtera Abadi, PT. Ketapang Subur Lestari, dan PT. Sawit Graha Manunggal.

Dapat dilihat bahwa karakteristik badan pelaksana bekerja dengan baik, disiplin dan memperhatikan kebijakan pemerintah yang tercantum dalam peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang pembangunan kebun masyarakat (plasma).

4. Komunikasi antar Badan Pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan

kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

Terkait komunikasi antar badan pelaksana, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 1) menyatakan bahwa :

“Pihak perusahaan perkebunan sangat jelas telah mengetahui kewajiban pembangunan kebun plasma, karena telah mendapat sosialisasi serta surat kedinasan secara rutin. Dan dalam mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan pelaku usaha diwajibkan menyisihkan 20% areal pelepasan untuk kebun plasma”.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 1), juga menyatakan bahwa :

“Telah dilaksanakan sosialisasi Pemkab Bartim, yang ditujukan untuk pelaku usaha (PBS), SKPD teknis, DPRD, Camat, Kades, Damang dan perwakilan masyarakat. Sosialisasi tersebut antara lain 1). Tahun 2011 s.d 2013, 2). Sosialisasi Perda Provinsi Kalteng No. 5 Tahun 2011, Tahun 2015 Sosialisasi Pergub Kalteng No, 12 Tahun 2014, 3). Surat-surat kedinasan terkait pembinaan PBS terhadap pembangunan kebun plasma”.

Terkait komunikasi antar badan pelaksana, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 2) menyatakan bahwa :

“PBS telah mengetahui dan pemerintah mendorong implementasi plasma untuk masyarakat”.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 2), juga menyatakan bahwa :

“Sebelum pengajuan IUP, PBS dijelaskan kewajiban pembangunan plasma minimal 20%. PUP (Penilaian Usaha Perkebunan) adalah salah satu unsur penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan kebun plasma oleh PBS”.

Manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 4) terkait komunikasi antar badan pelaksana, menyatakan bahwa :

“Perusahaan perkebunan mengetahui kewajiban pembangunan kebun masyarakat (plasma) seluas 20% dari areal yang diusahakan dan sudah diterapkan”.

Manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 4) terkait komunikasi antar badan pelaksana, juga menyatakan bahwa :

“Sudah ada sosialisasi dan pihak legislatif pun turut melakukan controlling untuk kebijakan tersebut”.

Manajemen PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 10) terkait komunikasi antar badan pelaksana, menyatakan bahwa :

“Perusahaan cukup mengetahui dengan kebijakan dengan bukti perusahaan dengan serius membangun kebun masyarakat”.

Manajemen PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 10) terkait komunikasi antar badan pelaksana, juga menyatakan bahwa :

“Ada sosialisasi, dengan ikut serta dalam rangka sosialisasi bersama pihak perusahaan”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 11) terkait komunikasi antar badan pelaksana, menyatakan bahwa :

“Perusahaan mengetahui kewajiban pembangunan kebun plasma, dengan bukti sudah ada pembangunan kebun plasma”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy (Narasumber No. 11) terkait komunikasi antar badan pelaksana, juga menyatakan bahwa :

“Ada sosialisasi, sewaktu masuk perusahaan”.

Manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 16) terkait komunikasi antar badan pelaksana, menyatakan bahwa :

“PT. Bhadra Cemerlang mengetahui kewajiban pembangunan kebun masyarakat (plasma) 20%. Namun IUP dan HGU PT. Bhadra Cemerlang telah terbit sebelum tahun 2007, sehingga PT. Bhadra Cemerlang terkendala masalah ketersediaan lahan. Dan saat ini PT. Bhadra Cemerlang tetap berkomitmen terhadap kewajiban dimaksud dengan menerapkan kemitraan lainnya”.

Manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 16) terkait komunikasi antar badan pelaksana, juga menyatakan bahwa :

“PT. Bhadra Cemerlang pernah mengikuti sosialisasi dari pemerintah terkait kewajiban plasma, di tahun 2010, 2013 dan 2015, serta surat kedinasan setiap tahun terkait kewajiban pembangunan kebun masyarakat”.

Badan pelaksana kebijakan kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat (plasma) adalah pemerintah dan perusahaan perkebunan. Dari hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa narasumber di atas, diketahui bahwa keterlibatan pemerintah daerah sebagai badan pelaksana kebijakan sudah cukup baik. Pemerintah daerah mendorong perusahaan perkebunan agar dapat merealisasikan pembangunan kebun untuk masyarakat (plasma) sesuai standar kebijakan yaitu 20% areal yang diusahakan perusahaan perkebunan adalah untuk pembangunan kebun masyarakat (plasma). Pemerintah daerah terus menerus melakukan pembinaan dan sosialisasi, monitoring serta evaluasi terhadap perusahaan perkebunan terkait kewajiban pembangunan kebun masyarakat (plasma). Hal itu dilakukan pemerintah dengan tujuan apabila kebun untuk masyarakat dapat dibangun oleh perusahaan perkebunan, maka ke depan diharapkan ada

penambahan pendapatan bagi masyarakat setempat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Perusahaan perkebunan sebagai badan pelaksana juga selalu terbuka terhadap upaya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Hubungan dan koordinasi antara perusahaan perkebunan dengan pemerintah daerah terjalin dengan baik.

Dengan demikian implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma) oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur sudah berjalan cukup efektif terlihat dari adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur. Sebagaimana yang disampaikan Van Meter dan Van Horn, dalam Widodo 1974, bahwa prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5. Disposisi/ Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Agustino Leo (2006:94):

”Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak

mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Meter dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Meter dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Dari hasil kuisioner lapangan, terkait disposisi/sikap para pelaksana mengenai tanggapan perusahaan perkebunan dan tanggapan masyarakat dalam penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat

(plasma), dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Narasumber No. 1), menyatakan bahwa :

“Perusahaan menanggapi secara positif terhadap kebijakan dimaksud karena dalam hal ini bagi PBS akan menjadi keuntungan, bahwa kebun plasma dapat menjadi pagar hidup terhadap stabilitas sosial di sekitar kebun inti. Masyarakat menyambut baik terhadap pembangunan kebun plasma dan upaya kemitraan lainnya yang diwujudkan oleh PBS”.

Terkait disposisi/sikap para pelaksana mengenai tanggapan perusahaan perkebunan dan tanggapan masyarakat dalam penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 4), menyatakan bahwa :

“Perusahaan sangat mendukung pola kebijakan tersebut. Selain itu juga guna menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat. Tanggapan masyarakat sangat positif”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 5), terkait disposisi/sikap para pelaksana mengenai tanggapan perusahaan perkebunan dan tanggapan masyarakat dalam penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan., menyatakan bahwa :

“Menurut saya tanggapan perusahaan sangat positif dan tangan terbuka menyambut kebijakan tersebut. Tanggapan dari kami sebagai masyarakat sangat merespon positif”.

Manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 12), terkait disposisi/sikap para pelaksana mengenai tanggapan perusahaan

perkebunan dan tanggapan masyarakat dalam penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan., menyatakan bahwa :

“Perusahaan menyambut baik kebijakan ini sebagai bagian dari pengamanan kebun inti dari masalah sosial dengan masyarakat sekitar. Masyarakat menyambut baik terhadap kebijakan plasma dan terkait pola kemitraan lainnya”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Narasumber No. 13), terkait disposisi/sikap para pelaksana mengenai tanggapan perusahaan perkebunan dan tanggapan masyarakat dalam penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan., menyatakan bahwa :

“Tanggapan PT. Tamiyang Sumber Rejeki setahu kami, akan melaksanakan pembangunan kebun plasma bersamaan dengan kebun inti setelah PT. Tamiyang Sumber Rejeki melaksanakan pembebasan lahan/GRTT dari masyarakat. Masyarakat mengharapkan PT. Tamiyang Sumber Rejeki dapat segera melaksanakan pembangunan kebun masyarakat”.

Manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 20), terkait disposisi/sikap para pelaksana mengenai tanggapan perusahaan perkebunan dan tanggapan masyarakat dalam penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, menyatakan bahwa :

“Tanggapan perusahaan positif dengan tangan terbuka menyambut kebijakan dengan pola kemitraan yang diatur oleh pemerintah”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 21), terkait disposisi/sikap para pelaksana mengenai tanggapan perusahaan perkebunan dan tanggapan masyarakat dalam

penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan., menyatakan bahwa :

“Sangat mendukung pola kebijakan tersebut. Dan masyarakat menanggapi positif”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ketapang Subur Lestari (Narasumber No. 23), terkait disposisi/sikap para pelaksana mengenai tanggapan perusahaan perkebunan dan tanggapan masyarakat dalam penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan., menyatakan bahwa :

“Perusahaan bersedia menyediakan/membuat kebun plasma untuk masyarakat. Tanggapan masyarakat menerima dan menyambut baik karena memberi manfaat dalam penambahan penghasilan keluarga”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Mitra Jaya Agro Palm (Narasumber No. 27), terkait disposisi/sikap para pelaksana mengenai tanggapan perusahaan perkebunan dan tanggapan masyarakat dalam penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan., menyatakan bahwa :

“Perusahaan sangat mendukung tetapi tindakan belum dilaksanakan. Masyarakat sangat mendukung karena merupakan harapan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan kebun”.

Manajemen PTP. Nusantara XIII (Narasumber No. 28), terkait disposisi/sikap para pelaksana mengenai tanggapan perusahaan perkebunan dan tanggapan masyarakat dalam penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dengan pola kemitraan antara

masyarakat dengan perusahaan perkebunan, diketahui dari penelitian di lapangan bahwa PTP. Nusantara XIII vakum dari kegiatan pengelolaan usaha perkebunan, lahan dikuasai penuh oleh masyarakat setempat. PTP. Nusantara XIII adalah perusahaan perkebunan yang melakukan usaha perkebunan komoditi tanaman karet.

Perwakilan masyarakat di sekitar PTP. Nusantara XIII (Narasumber No. 29), terkait disposisi/sikap para pelaksana mengenai tanggapan perusahaan perkebunan dan tanggapan masyarakat dalam penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan., menyatakan bahwa :

“Sangat mendukung karena merupakan kewajiban perusahaan perkebunan terhadap masyarakat. Masyarakat sangat mengharapkan mendapat plasma karena mendapatkan hasil tambahan”.

Manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 30), terkait disposisi/sikap para pelaksana mengenai tanggapan perusahaan perkebunan dan tanggapan masyarakat dalam penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, menyatakan bahwa :

“Perusahaan sangat mendukung program tersebut untuk keamanan dan menjaga iklim investasi yang kondusif. Tanggapan masyarakat antusias”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 31), terkait disposisi/sikap para pelaksana mengenai tanggapan perusahaan perkebunan dan tanggapan masyarakat dalam penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma),

dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan., menyatakan bahwa :

“Perusahaan menyambut baik karena itu merupakan kewajiban dalam berinvestasi yaitu mensejahterakan masyarakat salah satunya melalui pola kemitraan yang sudah dituangkan. Tanggapan masyarakat cukup senang karena melalui hasil pola kemitraan, masyarakat dapat menerima hasil tambahan dari kebun plasma”.

Berdasarkan hasil sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa narasumber di atas, didapat bahwa beberapa perusahaan perkebunan sebagai para pelaksana, menanggapi secara positif terhadap kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma). Dalam hal ini bagi perusahaan perkebunan akan menjadi suatu keuntungan, karena kebun plasma dapat menjadi pagar hidup terhadap stabilitas sosial di sekitar kebun inti.

Perusahaan perkebunan menerima kebijakan pemerintah mengenai kewajiban perusahaan perkebunan untuk membangun kebun masyarakat (plasma) seluas 20% dari areal yang diusahakan. Dan masyarakat menyambut baik pembangunan kebun masyarakat (plasma) dan upaya kemitraan lainnya yang diwujudkan oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur.

Namun ada perusahaan milik negara yaitu PTP. Nusantara XIII yang vakum dari kegiatan pengelolaan usaha perkebunan sehingga lahan dikuasai penuh oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat mengelola kebun tersebut dan menerima hasil dari kebun tersebut.

Dari apa yang dikemukakan oleh beberapa narasumber di atas, disimpulkan bahwa masyarakat menerima kebijakan ini, perusahaan perkebunan juga sebagian menerima kebijakan ini yaitu terlihat dengan sudah merealisasikan pembangunan kebun untuk masyarakat (plasma). Namun ada

juga perusahaan yang tidak menerima kebijakan ini dilihat dari tidak adanya realisasi plasma. Masyarakat sangat berharap seperti yang dikemukakan oleh narasumber dari perwakilan masyarakat di sekitar PTP. Nusantara XIII.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Terkait kondisi sosial ekonomi, pendapatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma), manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 4), menyatakan bahwa :

“Masyarakat awalnya Cuma berkebun, bertani atau nelayan sehingga masih kekurangan. Masyarakat sangat senang karena selain dapat bekerja di perusahaan, mereka juga mendapat kebun plasma guna menunjang hidup mereka”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Narasumber No. 5), terkait kondisi sosial ekonomi, pendapatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma), menyatakan bahwa :

“Sebelum adanya pembangunan kebun masyarakat, pendapatan masyarakat sekitar sangat pas-pasan. Setelah adanya program pemerintahan yang dilakukan atau diterapkan oleh perusahaan perkebunan, pendapatan masyarakat meningkat”.

Manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 16), terkait kondisi sosial ekonomi, pendapatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma), menyatakan bahwa :

“Pendapatan masyarakat sekitar sebelum adanya pembangunan plasma/kemitraan bergantung dari hasil kebun lokal di mana produksi kebunnya tidak memenuhi standar/volume yang diharapkan belum mencukupi/belum sesuai. Masyarakat sekitar PT. Bhadra Cemerlang terbantu dengan mendapatkan penyuluhan/pembinaan, bibit unggul, bibit berkualitas, sehingga hasil kebun masyarakat yang bermitra dengan PT. Bhadra Cemerlang mampu untuk meningkatkan pendapatan keluarga”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang (Narasumber No. 17), terkait kondisi sosial ekonomi, pendapatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma), menyatakan bahwa :

“Sebelum adanya pembangunan kebun masyarakat, masih di bawah standar kebutuhan hidup masyarakat, karena mata pencaharian utama dari perkebunan yang sangat dipengaruhi musim. Sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat agak sedikit mendekati kesejahteraan karena masyarakat dapat bekerja di PBS dan mendapatkan hasil tambahan dari kebun plasma”.

Manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 20), terkait kondisi sosial ekonomi, pendapatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma), menyatakan bahwa :

“Sebelum adanya pembangunan kebun masyarakat, sepengetahuan saya yaitu sangat pas-pasan setelah adanya kebun plasma ada sedikit perubahan ke lebih baik/meningkat. Setelah adanya kebun plasma, pendapatan masyarakat meningkat”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Narasumber No. 21), terkait kondisi sosial ekonomi, pendapatan masyarakat

sekitar perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma), menyatakan bahwa :

“Sebelum adanya pembangunan kebun masyarakat, kurang/masih di bawah standar perihal pendapatan tersebut. Sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat, pendapatan sudah meningkat”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Ketapang Subur Lestari (Narasumber No. 23), terkait kondisi sosial ekonomi, pendapatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma), menyatakan bahwa :

“Sebelum adanya pembangunan kebun masyarakat, pendapatan dari penghasilan rutin sebagai tani karet. Sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat, ada penambahan dari kebun plasma”.

Manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 30), terkait kondisi sosial ekonomi, pendapatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma), menyatakan bahwa :

“Dengan adanya pembangunan kebun masyarakat, masyarakat terbantu dan ada peningkatan. Ada perubahan ke arah perbaikan”.

Perwakilan masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Narasumber No. 31), terkait kondisi sosial ekonomi, pendapatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sebelum dan sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma), menyatakan bahwa :

“Sebelum adanya pembangunan kebun masyarakat, rata-rata pendapatan sebelum adanya pola kemitraan yaitu berada di bawah rata-rata karena masyarakat hanya bergantung dari hasil alam. Setelah adanya kebun plasma/pola kemitraan rata-rata pendapatan sudah ke arah sejahtera karena masyarakat mulai merasakan hasil dari pola kemitraan walaupun masih kurang dari harapan mengingat usia tanaman yang masih muda”.

Sebagaimana yang dikemukakan narasumber-narasumber di atas, didapat bahwa perusahaan perkebunan mendukung kebijakan pemerintah mengenai pembangunan kebun untuk masyarakat (plasma) setempat. Dari segi sosial ekonomi masyarakat setempat diuntungkan dengan kehadiran perusahaan perkebunan, selain masyarakat setempat diterima bekerja di perusahaan perkebunan tersebut, masyarakat setempat juga mendapatkan kebun plasma.

Seperti yang dikemukakan beberapa narasumber di atas, sebelum adanya pembangunan kebun masyarakat, rata-rata pendapatan sebelum adanya pola kemitraan yaitu berada di bawah rata-rata karena masyarakat hanya bergantung dari hasil alam. Setelah adanya kebun plasma masyarakat mulai merasakan ada penambahan pendapatan dari hasil pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat (plasma) walaupun masih kurang dari harapan mengingat usia tanaman yang masih muda.

Ini berarti bahwa kebijakan pemerintah ini sangat tepat digulirkan karena secara politik dapat menjaga keamanan kebun inti perusahaan itu sendiri dan juga menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Sebelum adanya pembangunan kebun untuk masyarakat, pendapatan masyarakat setempat rata-rata masih bergantung dari hasil mata pencaharian sebagai petani karet/hasil alam. Sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma) pendapatan masyarakat setempat ada penambahan penghasilan.

7 perusahaan yang sudah melakukan kemitraan dengan masyarakat dan merealisasikan pembangunan kebun untuk masyarakat (plasma). Perusahaan tersebut adalah 1). PT. Agro Mandiri Sukses, luas areal yang

diusahakannya adalah 14.363 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 2.872,6 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 42,458 hektar yang dibagi kepada 21 orang/KK, dan sisa kewajiban adalah 2.830,142 hektar. 2). PT. Heroes Green Energy, luas areal yang diusahakannya adalah 3.400 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 680 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 384,20 hektar yang dibagi kepada 455 orang/KK, dan sisa kewajiban adalah 295,8 hektar. 3). PT. Bhadra Cemerlang luas areal yang diusahakannya adalah 6.168 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 1.233,6 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 365,86 hektar yang dibagi kepada 130 orang/KK, dan sisa kewajiban adalah 867,74 hektar. 4). PT. Borneo Ketapang Indah, luas areal yang diusahakannya adalah 10.600 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 2.120 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 827,08 hektar yang dibagi kepada 398 orang/KK, dan sisa kewajiban adalah 1.292,92 hektar. 5). PT. Indopenta Sejahtera Abadi, luas areal yang diusahakannya adalah 16.455 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 3.291 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 736,22 hektar yang dibagi kepada 254 orang/KK, dan sisa kewajiban adalah 2.554,78 hektar. 6). PT. Ketapang Subur Lestari, luas areal yang diusahakannya adalah 3.573,110 hektar. dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 714,622 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 372,05 hektar yang dibagi kepada 469 orang/KK, dan sisa kewajiban adalah

342,572 hektar. 7). PT. Sawit Graha Manunggal, luas areal yang diusahakannya adalah 17.467,23 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 3.493,446 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 2.201,23 hektar yang dibagi kepada 1.549 orang/KK, dan sisa kewajiban adalah 1.292,216 hektar.

Sedangkan 7 Perusahaan lainnya masih belum melaksanakan kewajiban pembangunan kebun masyarakat (plasma) di Kabupaten Barito Timur adalah PT. Borneo Subur Semesta, PT. Ciliandry Anky Abadi, PT. Tamiyang Sumber Rejeki, PT. Tirta Madu, PT. Sandabi Indah Lestari, PT. Mitra Jaya Agro Palm, dan PTP. Nusantara XIII.

Dengan melihat 6 (enam) aspek yang dibahas dengan konsep Van Meter dan Van Horn sebagaimana pembahasan di atas, dan berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi, disimpulkan bahwa 7 perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur sudah menyerahkan kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat (plasma) tetapi jumlahnya belum sesuai ketentuan. Namun dengan adanya geliat pembangunan kebun masyarakat (plasma) tersebut, itu berarti bahwa ada penerimaan positif dari masyarakat selaku penerima manfaat dan juga penerimaan positif dari perusahaan perkebunan selaku pihak yang dikenakan kewajiban pembangunan kebun masyarakat. Selain itu keterlibatan pemerintah juga ada yaitu dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan perkebunan, untuk dapat memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat (plasma) sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian implementasi kebijakan publik dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Timur sudah berjalan cukup baik. Ke depan diharapkan pemerintah dapat mendorong seluruh perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur agar dapat merealisasikan pembangunan kebun masyarakat (plasma), sesuai ketentuan yaitu 20% dari areal yang diusahakan, sehingga tujuan pemerintah mensejahterakan masyarakat Kabupaten Barito Timur dapat tercapai.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) dengan Pola Kemitraan Antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Timur, adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pola kemitraan dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) yang diterapkan Perusahaan Perkebunan kepada masyarakat adalah dilaksanakan pola inti dan plasma (80:20), yaitu dari 100 % areal yang diusahakan perusahaan perkebunan untuk pembangunan kebun, 80% dari areal kebun tersebut adalah hak perusahaan perkebunan. Dan 20% dari areal kebun tersebut adalah hak masyarakat.
2. Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa keterlibatan pemerintah daerah sebagai badan pelaksana dalam implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), sudah cukup baik. Pemerintah daerah dalam memberikan Izin Usaha Perkebunan secara jelas dan tegas menyampaikan tentang kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat (plasma) seluas 20% dari luas areal yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan sebagai badan pelaksana juga mengetahui kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat. Dari hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa dari 14 perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Barito Timur, ada

7 perusahaan perkebunan yang sudah menyerahkan kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun inti perusahaan perkebunan. 7 perusahaan tersebut adalah

- 1). PT. Agro Mandiri Sukses, luas areal yang diusahakannya adalah 14.363 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 2.872,6 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 42,458 hektar, dan sisa kewajiban adalah 2.830,142 hektar.
- 2). PT. Heroes Green Energy, luas areal yang diusahakannya adalah 3.400 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 680 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 384,20 hektar, dan sisa kewajiban adalah 295,8 hektar.
- 3). PT. Bhadra Cemerlang luas areal yang diusahakannya adalah 6.168 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 1.233,6 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 365,86 hektar, dan sisa kewajiban adalah 867,74 hektar.
- 4). PT. Borneo Ketapang Indah, luas areal yang diusahakannya adalah 10.600 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 2.120 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 827,08 hektar, dan sisa kewajiban adalah 1.292,92 hektar.
- 5). PT. Indopenta Sejahtera Abadi, luas areal yang diusahakannya adalah 16.455 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 3.291 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 736,22 hektar, dan sisa kewajiban adalah 2.554,78 hektar.
- 6). PT. Ketapang Subur Lestari, luas areal yang diusahakannya adalah 3.573,110 hektar, dengan kewajiban

plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 714,622 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 372,05 hektar, dan sisa kewajiban adalah 342,572 hektar. 7). PT. Sawit Graha Manunggal, luas areal yang diusahakannya adalah 17.467,23 hektar, dengan kewajiban plasma untuk masyarakat (20% dari areal yang diusahakan) yaitu 3.493,446 hektar, yang sudah direalisasikan seluas 2.201,23 hektar, dan sisa kewajiban adalah 1.292,216 hektar.

Sedangkan 7 Perusahaan lainnya masih belum melaksanakan kewajiban pembangunan kebun masyarakat (plasma) di Kabupaten Barito Timur adalah PT. Borneo Subur Semesta, PT. Ciliandry Anky Abadi, PT. Tamiyang Sumber Rejeki, PT. Tirta Madu, PT. Sandabi Indah Lestari, PT. Mitra Jaya Agro Palm, dan PTP. Nusantara XIII.

Dari beberapa hal di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) dengan Pola Kemitraan Antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Timur, sudah berjalan cukup baik, kebijakan diterima oleh perusahaan perkebunan dan juga diterima oleh masyarakat di Kabupaten Barito Timur, serta ada keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mendorong pembangunan kebun untuk masyarakat melalui pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan perkebunan. Namun masih belum terlihat keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemberian sanksi bagi perusahaan perkebunan yang belum atau tidak dapat merealisasikan pembangunan kebun masyarakat (plasma), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan, pasal 60 ayat (2) menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dikenai sanksi administratif berupa denda, pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan, dan/atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan.

B. Saran

Saran ke depan agar Kebijakan Publik dalam Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma) dengan Pola Kemitraan Antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Timur dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. Pemerintah Daerah perlu mendorong 7 perusahaan perkebunan yang sudah menyerahkan plasma tetapi belum sesuai ketentuan. Dan juga mendorong 7 perusahaan perkebunan lainnya yang belum menyerahkan plasma, agar dapat segera menyerahkan plasma atau segera melaksanakan kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai ketentuan yaitu 20% dari luas areal yang diusahakan perusahaan perkebunan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 60 ayat (2) menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dikenai sanksi administratif berupa denda, pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan, dan/atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan. Menindaklanjuti hal tersebut, seyogyanya Pemerintah Daerah harus mengambil sikap tegas untuk memberikan sanksi administratif bagi

perusahaan perkebunan yang tidak atau belum merealisasikan pembangunan kebun masyarakat (plasma).



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Arikunto, Suharsimi. (2007). *Manajemen Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.
- , (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Dunn, William. N., (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan FISIP UGM)*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffts. Prentice-Hall.Inc.
- Edward III, G.C. (1980). *Implementing Policy*. Washington DC. Congressional Quartely Inc.
- Hamdi, Muchlis dan Siti Ismaryati. (2016). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Islamy. (2010). *Kebijakan Publik*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Meyer dan Greenwood. (1984). *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta. CV. Rajawali.
- Moleong, Lexy (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosada Karya.
- Nawawi, H, (1985). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya. PMN.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan)*. Jakarta. PT. Elcx Komputindo Kelompok Gramedia.
- Pasolong. (2007). *Teori Administrasi Negara*. Bandung. Alfabet.

- Poerwandari, E. Kristi. (2007). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta. Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Universitas Indonesia.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Pertama PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian (1987). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suwitri, Sri, Ida Hayu Dwimawanti, dan Hardi Warsono. (2016). *Teori Administrasi*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Subarsono, A, G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabet.
- (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung. Alfabet.
- Syafie, H. Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Wahab, S.A. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- _____. (2012). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang. UMM Press.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Dokumen dan Peraturan**
- Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur. (2018). *Data Matrik Perkembangan Perusahaan Perkebunan Tahun 2018*. Tamiang Layang. Bidang Perkebunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 - 2034*.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan*.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang *Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang *Kemitraan*.
- Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang *Usaha Kecil*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang *Perkebunan*.

Lampiran 1. Deskripsi jawaban narasumber untuk kuisisioner Point A.

A. Sasaran dan Kebijakan dari Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma).

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penerapan/implementasi kebijakan publik dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) yaitu 20% dari luas areal yang diusahakan perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan pola kemitraan atau kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma)? yang mana masyarakat adalah sebagai sasaran/penerima manfaat dari kebijakan publik tentang pembangunan kebun masyarakat (plasma).

No.	Narasumber	Deskripsi Jawaban	Ket.
1.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Ir. Riza Rahmadi, M.M)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Penerapan pembangunan kebun masyarakat (plasma) 20% dari areal yang diusahakannya telah berjalan semenjak diterbitkannya Permentan 98/2013. Dan untuk Kabupaten Barito Timur dimulai pada tahun 2013 di PT. Sawit Graha Manunggal, disusul kemitraan PT. Bhadra Cemerlang tahun 2014, dan pembangunan plasma di PT. Indopenta Sejahtera Abadi pada tahun 2016, dan PT. Borneo Ketapang Indah, PT. Ketapang Subur Lestari, PT. Heroes Green Energy pada tahun 2017." 2. "Pola kemitraan pembangunan kebun plasma bersifat wajib dan telah berjalan sampai dengan saat ini, yang disebut dengan pola inti dan plasma. Kemitraan lainnya yang dilaksanakan PBS bersama masyarakat sekitar antara lain kerjasama transportasi, kerjasama tenaga kerja." 	
2.	Kepala Bidang Perkebunan (Supadmin, S.P, M.M.A)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Penerapan plasma 20% telah direalisasi oleh PBS yang perolehan IUP setelah tahun 2007. Namun PBS yang IUP sebelum 2007 juga telah melaksanakan kemitraan masyarakat." 2. "Pola yang dilaksanakan PBS yaitu pola inti dan plasma, pola kerjasama transportasi/angkutan TBS dan CPO, untuk pembangunan plasma yang terkendala lahan PBS agar dapat membangun kebun masyarakat." 	
3.	Kepala Seksi Binus PPHIP (Oktavina, S.Hur)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Penerapan plasma 20% telah direalisasikan oleh beberapa perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur." 2. "Pola kemitraan yang dilaksanakan perusahaan perkebunan adalah pola inti dan plasma. Di mana areal 80% manfaat untuk kebun inti/untuk perusahaan, dan 20% manfaat untuk plasma/untuk masyarakat." 	
4.	Manajemen PT. Agro	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Menurut saya hal tersebut sangat bagus untuk kepentingan masyarakat, dan pemerintah sudah menerapkan dalam 	

	Mandiri Sukses (Rudi Indrawan)	kebijakannya.” 2. “Pola kemitraan tersebut sudah terlaksana dan polanya dalam bentuk koperasi di mana pengurus, pengawasnya, dan anggotanya sepenuhnya dari masyarakat.	
5.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Neneng K.I)	1. “Menurut saya sudah berjalan dengan lancar dan sesuai aturan.” 2. “Pola kemitraan sudah terlaksana dan tepat sasaran.”	
6.	Manajemen PT. Borneo Subur Semesta (Helman)	1. “Saya setuju dengan pola ini, tetapi perlu penambahan persentasenya dari lahan yang diusahakan seperti \pm 25% - 30%.” 2. “Pola kemitraan ini belum berjalan sebagaimana mestinya karena ada sebagian dari anggota masyarakat yang menganggap merugikan mereka. Dan point ini masyarakat Barito Timur belum terbiasa dengan pola kerja perkebunan kelapa sawit.”	
7.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Subur Semesta (Arianto)	1. “Saling menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur dengan adanya pola 20% dari luasan yang dibebaskan masyarakat.” 2. “Dengan adanya plasma, masyarakat bisa merasakan hasil dari kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat, yaitu hasil dari pola kemitraan 20% milik masyarakat.”	
8.	Manajemen PT. Ciliandry Anky Abadi (Helman Yusuf)	1. “Harus diimplementasikan/dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Perkebunan.” 2. “Pola kemitraan yang sesuai peraturan adalah 80% untuk inti dan 20% untuk plasma.	
9.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Ciliandry Anky Abadi (Ananta)	1. “Masih belum semua perusahaan menerapkan.” 2. “Masyarakat memberi lahan kepada perusahaan dan mengharapkan pengembalian lahan sebanyak 20% seperti peraturan pemerintah/Undang-Undangnya.”	
10.	Manajemen PT. Heroes Green Energy (Amir Mahmud)	1. “Masih kurang, akan lebih baik persentasenya berkisar 20% -30%.” 2. “Pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada masyarakat yang kurang paham dan peduli.”	
11.	Perwakilan Masyarakat	1. “Sudah sesuai dengan aturan pemerintah.” 2. “Sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditanda tangan.”	

	di sekitar PT. Heroes Green Energy (Sindelman)		
12.	Manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Anton Siregar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Kebijakan 20% plasma sudah diterapkan namun masih belum 100% terlaksana, karena terkendala pembebasan lahan dan mengikuti pembangunan pola kebun inti." 2. "Pelaksanaan pembangunan kebun plasma 20% dari kebun inti telah berjalan, disamping itu pola kemitraan lainnya yang diperoleh masyarakat sekitar adalah angkutan dan tenaga kerja. Hal itu nanti dapat kami terapkan dikemudian hari." 	
13.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Dewiantoro)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Implementasi kebijakan plasma 20% sangat diharapkan oleh masyarakat sekitar PT. TSR." 2. "Pola kemitraan melalui kebun plasma 20% sangat diperlukan. Pola kemitraan yang disebutkan sebaiknya dalam berbagai hal. Misalnya kebun inti-plasma, angkutan, tenaga kerja, bantuan pengolahan lahan dan lain-lain." 	
14.	Manajemen PT. Tirta Madu (Abdi Wahyu S.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Perusahaan berkewajiban membangun kebun masyarakat (plasma) dengan luasan 20% dari luas areal Izin Usaha Perkebunan." 2. "Masyarakat bersedia menyerahkan lahannya untuk dibangun kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan 80:20." 	
15.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tirta Madu (Riwat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Baik, tinggal pemerintah meningkatkan lagi." 2. "Untuk pelaksanaan sudah bagus, tinggal pemerintah mengawasi dan menjamin." 	
16.	Manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Suwari)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Menurut saya implementasi pembangunan kebun plasma 20% sangat baik untuk mensejahterakan masyarakat sekitar kebun perusahaan. Dan PT. Bhadra Cemerlang mendukung kebijakan dimaksud dengan menjalankan program-program kemitraan pembangunan kebun masyarakat dengan komoditi karet dan sawit." 2. "Pola kemitraan di PT. Bhadra Cemerlang telah dilaksanakan dengan bermitra dengan kelompok tani untuk program bibit karet dan pembangunan kebun sawit masyarakat serta pola kemitraan lainnya di bidang transportasi/angkutan." 	
17.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Bhadra	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tapi khusus di wilayah kerja PT. Bhadra Cemerlang tidak berjalan dengan baik karena bentuk pembangunan kebun plasma tidak dilaksanakan, hanya berupa pola kemitraan antara masyarakat 	

	Cemerlang (Hengky Khairudin)	dengan PBS.” 2. “Untuk PT. Bhadra Cemerlang masih belum berjalan karena pola kemitraan hanya berupa kerjasama pengelolaan kebun karet masyarakat.”	
18.	Manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Erwin Fahriady)	1. “Secara umum sudah memenuhi ketentuan yang ada, namun masih ada perbaikan/langkah PEMDA bagi yang belum melakukannya.” 2. “Pola kemitraan atau kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku 20% masyarakat dan 80% perusahaan dari lahan yang diserahkan dan diusahakan, untuk lahan plasma diwadahi dengan koperasi.”	
19.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah (Rici Juprianto)	1. “Sudah berjalan dengan baik, karena setiap PBS khususnya PT. BKI sudah merealisasikan plasma ke masyarakat.” 2. “Pola plasma yang dilakukan oleh perusahaan sudah jelas sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 80% inti dan 20% plasma.”	
20.	Manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Bernard P. Siagian)	1. “Menurut saya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai aturan yaitu 20% dari areal.” 2. “Pola kemitraan sudah terlaksana, yang mana penerima plasma yaitu pemilik lahan adalah masyarakat yang melakukan pembebasan lahannya.”	
21.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Leni)	1. “Menurut saya bagus penerapannya dan bisa membantu perekonomian kedepannya.” 2. “Berjalan dengan baik dan dikelola oleh masyarakatnya langsung.”	
22.	Manajemen PT. Ketapang Subur Lestari (Erwin Fahriady)	1. “Sudah sesuai dengan kewajiban perusahaan.” 2. “Pelaksanaan kerjasamanya adalah pengelolaan kebun diserahkan kepada perusahaan, pemantauan dan pengawasan secara bersama-sama yang mana plasma diwadahi oleh koperasi.”	
23.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT.	1. “Berjalan baik, PT. KSI. sudah merealisasikan pembangunan plasma tahap I.” 2. “Pola kemitraan adalah 80% untuk inti dan 20% untuk masyarakat.”	

	Ketapang Subur Lestari (Sindelma)		
24.	Manajemen PT. Sandabi Indah Lestari (Budi I.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sudah sesuai dengan aturan/perundang-undangan yang berlaku dan penerapan serta prakteknya sudah berjalan." 2. "Sangat baik serta sangat memberikan dampak positif untuk menambah penghasilan keluarga dan masyarakat yang sudah menyerahkan lahannya, artinya tidak 100% kehilangan hak atas penyerahan lahannya kepada perusahaan." 	
25.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Sandabi Indah Lestari (Witerman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sudah sesuai dengan aturan pemerintah." 2. "Sudah berjalan sesuai dengan aturan dan sudah ada kerjasama yang baik." 	
26.	Manajemen PT. Mitra Jaya Agro Palm (Suradi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sebaiknya penerapan plasma 20% harus direalisasikan karena sudah tercantum dalam Permentan yang merupakan hak masyarakat." 2. "Pola kerjasama yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, dimana antara PBS dan masyarakat saling memberikan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan diantaranya seperti pola inti dan plasma, pola kemitraan/budidaya tanaman karet masyarakat, pola kerjasama transportasi, pola kerjasama tenaga kerja." 	
27.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Mitra Jaya Agro Palm (H. Swani)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sebaiknya pembangunan kebun masyarakat/plasma bisa direalisasikan sesuai aturan yang berlaku." 2. "Sampai saat ini pola kemitraan PBS khususnya di PT. MJAP masih belum direalisasikan akan tetapi pola kemitraan yang dilakukan berupa kerjasama angkutan TBS." 	
28.	Manajemen PTP. Nusantara XIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. - 	Perus. Vakum, lahan dikuasai penuh oleh masy. setempat.
29.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PTP. Nusantara XIII (Saimiun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sudah berjalan dan direalisasikan oleh perusahaan perkebunan terutama di areal PTPN XIII." 2. "Sudah direalisasikan perusahaan perkebunan 100% dan masyarakat sudah merasakan hasilnya." 	

30.	Manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Dwi Surono)	<ol style="list-style-type: none">1. "Sudah berjalan sesuai peraturan berlaku."2. "Pola 80% kebun inti dan 20% plasma."	
31.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Budin Jasa)	<ol style="list-style-type: none">1. "Sudah berjalan dengan baik, karena setiap PBS khususnya PT. SGM sudah merealisasikan plasma ke masyarakat sekitar, walaupun dikhususkan pada para pemilik tanah yang membebaskan ke PT. SGM sebanyak 20% dari areal yang dibebaskan."2. "Pola yang dilaksanakan sudah jelas karena pada dasarnya memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat khususnya di sekitar kebun. Dimana pola yang dilaksanakan yaitu pola 20% kebun kemitraan untuk masyarakat, pola kemitraan penyediaan tenaga kerja di persemaian maupun di lokasi kebun, pola kemitraan dalam hal angkutan buah/TBS, tanah."	



Lampiran 2. Deskripsi jawaban narasumber untuk kuisisioner Point B.

B. Sumber Daya

1. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu, sejauhmana keterlibatan masyarakat sekitar dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) oleh perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Barito Timur?
2. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu, bagaimana kemampuan finansial atau dana perusahaan perkebunan dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat (plasma) dengan pola kemitraan?

No.	Narasumber	Deskripsi Jawaban	Ket.
1.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Ir. Riza Rahmadi, M.M)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sejauh ini keterlibatan masyarakat adalah menyerahkan lahan kepada PBS untuk menjadi kebun kelapa sawit; dan 20% dari lahan yang diserahkan tersebut akan menjadi kebun plasma. Sedangkan keterlibatan masyarakat untuk mengolah lahan kebun plasmanya untuk mengurangi beban operasional masih belum terlaksana." 2. "Secara finansial, perusahaan perkebunan mampu untuk membiayai pembangunan kebun plasma. Dan masyarakat penerima plasma akan membayar kredit dari hasil penjualan TBS plasma sesuai kesepakatan bersama." 	
2.	Kepala Bidang Perkebunan (Supadmin, S.P, M.M.A)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Petani/masyarakat menyerahkan lahan, PBS membangun kebun plasma." 2. "PBS membiayai seluruh kebun plasma dan masyarakat membayar kredit dari hasil penjualan TBS dengan kesepakatan bersama." 	
3.	Kepala Seksi Binus PPHP (Oktavina, S.Hut)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Keterlibatan masyarakat sejauh ini hanya sebatas menyerahkan lahan kepada perusahaan perkebunan dan kebun plasma dikelola oleh perusahaan perkebunan dengan hasil yang dibagi." 2. "Secara finansial, perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur mampu membiayai pembangunan kebun masyarakat(plasma)." 	
4.	Manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Rudi Indrawan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Pola kemitraan sepenuhnya melibatkan masyarakat karena badan hukumnya adalah koperasi." 2. "Karena pembangunan kebun plasma adalah peraturan dari pemerintah, jadi perusahaan harus support penuh dan tidak membedakan dengan kebun inti untuk perawatannya." 	
5.	Perwakilan Masyarakat di	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sepengetahuan saya banyak masyarakat sekitar yang telah menjadi karyawan pada kebun plasma." 	

	sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Neneng K.I)	2. "Menurut saya secara finansial/keuangan perusahaan cukup besar dan cukup memadai hanya untuk membangun kebun plasma."	
6.	Manajemen PT. Borneo Subur Semesta (Helman)	1. "Pada saat ini yang banyak terlibat dalam pembangunan kebun adalah masyarakat kelas bawah, yang pendidikannya rata-rata SD." 2. "Dana perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Barito Timur ini rata-rata mempunyai modal yang kuat."	
7.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Subur Semesta (Arianto)	1. "Menjaga rasa kebersamaan di dalam melaksanakan tugas yang ditentukan oleh pihak perusahaan." 2. "Sesuai dengan kesepakatan awal pembiayaan plasma masyarakat sampai berhasil."	
8.	Manajemen PT. Ciliandry Anky Abadi (Helman Yusuf)	1. "Masyarakat menyerahkan lahan untuk perusahaan perkebunan dan 20% lahan yang diserahkan akan dijadikan plasma." 2. "Karena CAA Group menaungi 6 perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur, maka pembiayaan secara bergantian."	
9.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Ciliandry Anky Abadi (Ananta)	1. "Masyarakat belum dilibatkan dalam pembangunan kebun plasma." 2. "Perusahaan sangat mampu membangun kebun plasma."	
10.	Manajemen PT. Heroes Green Energy (Amir Mahmud)	1. "Masyarakat cukup dilibatkan, baik untuk tenaga kerja kasar maupun dalam pekerjaan proyek-proyek." 2. "Kemampuan perusahaan dalam penyiapan dana cukup."	
11.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy (Sindelman)	1. "Sudah ikut terlibat terutama penyerapan tenaga kerja." 2. "Cukup kuat."	
12.	Manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Anton Siregar)	1. "Masyarakat sekitar cukup terlibat dalam pembangunan kebun plasma, namun disini PT. TSR belum memulai karena terkendala pembebasan tanah dari masyarakat." 2. "Secara finansial perusahaan akan mampu membiayai pembangunan kebun inti bersama dengan kebun plasma."	
13.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tamiyang Sumber	1. "Masyarakat sekitar wajib terlibat dalam pembangunan kebun plasma baik dari sisi lokasi, produksi dan angka kredit, yang nantinya secara terbuka diinformasikan PT. TSR kelak."	

	Rejeki (Dewiantoro)	2. "Perusahaan berinvestasi pastilah telah memiliki finansial yang memadai, baik untuk pembangunan kebun inti dan plasma."	
14.	Manajemen PT. Tirta Madu (Abdi Wahyu S.)	1. "Pemilik kebun plasma bersedia dan akan ikut bergabung dengan koperasi (sebagai wadah dari anggota pemilik kebun plasma)." 2. "Baik, adanya kerjasama antara perusahaan dengan pihak pembiayaan lainnya."	
15.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tirta Madu (Riwat)	1. "Sangat dilibatkan, sering ikut rapat." 2. "Finansial sangat kuat, jalan terus."	
16.	Manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Suwari)	1. "Keterlibatan masyarakat sekitar perusahaan inti, terlihat pada program kemitraan karet di mana masyarakat sekitar yang menjadi anggota poktan dan masyarakat tersebut yang terlibat langsung dalam pembangunan kebun." 2. "PT. BCL secara finansial siap dalam pembiayaan seperti halnya perusahaan ASTRA lainnya, hanya ketersediaan lahan terkadang menjadi faktor penghambat."	
17.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang (Hengky Khairudin)	1. "Masih belum terlalu banyak terlibat masyarakat dalam pembangunan kebun, hanya sebatas tenaga kerja saja." 2. "Baik, kadang terkendala keadaan situasi dan kondisi lahan tersebut."	
18.	Manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Erwin Fahriady)	1. "Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kebun plasma cukup dominan dalam segala hal, misal pemantauan tanaman dan perawatan." 2. "Dibiaya langsung untuk tahap awal oleh perusahaan setelah kebun terbangun, baru melibatkan perbankan."	
19.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah (Rici Juprianto)	1. "Cukup baik dan kooperatif tentang perihal pengawasan dan pembinaan." 2. "PT. BKI bisa diandalkan dalam pembangunan kebun plasma masyarakat."	
20.	Manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Bernard Siagian)	1. "Sepengetahuan saya keterlibatan masyarakat sekitar adalah ikut serta dalam pengelolaan kebun plasma yaitu dengan menjadi karyawan pada kebun plasma tersebut." 2. "Menurut saya finansial dana perusahaan yang dikucurkan cukup besar dan kemampuan finansial cukup bisa membangun kebun dengan baik."	
21.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT.	1. "Menurut saya sejauh ini keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan plasma sangat baik, salah satunya menjadi karyawan plasma."	

	Indopenta Sejahtera Abadi (Leni)	2. "Menurut saya perusahaan terus mendukung penuh tidak membedakan dengan kebun yang lain untuk perawatannya."	
22.	Manajemen PT. Ketapang Subur Lestari (Erwin Fahriady)	1. "Sangat baik dan menyambutnya dengan memberikan dukungan." 2. "Bisa diandalkan, PT. KSL membangun lebih dulu kebun plasma."	
23.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Ketapang Subur Lestari (Sindelman)	1. "Masyarakat diikutsertakan dalam suatu wadah koperasi penerima manfaat plasma." 2. "Sangat mampu."	
24.	Manajemen PT. Sandabi Indah Lestari (Budi I.)	1. "Sejauh ini berdasarkan pengamatan kami perusahaan sangat memberikan keleluasaan untuk masyarakat agar bisa ambil bagian dalam plasma khususnya bagi masyarakat yang sudah menyerahkan lahannya." 2. "Sangat mampu serta mapan dan mewah."	
25.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Sandabi Indah Lestari (Witerman)	1. "Pembangunan untuk kebun plasma dengan kebun inti bersama dan melibatkan tenaga kerja lokal, namun belum direalisasi sampai sekarang." 2. "Cukup kuat/ada dana yang cukup."	
26.	Manajemen PT. Mitra Jaya Agro Palm (Suradi)	1. "Petani/masyarakat menyerahkan lahan untuk dibuka menjadi kebun kelapa sawit dan 20% dari lahan yang diserahkan akan menjadi kebun plasma." 2. "Sudah cukup baik dan mampu membiayai pembangunan kebun plasma."	
27.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Mitra Jaya Agro Palm (H. Swani)	1. "Keterlibatan masyarakat hanya berupa kerjasama dalam hal penyediaan tenaga kerja dan transportasi, angkutan buah/TBS." 2. "Sebenarnya perusahaan mampu membangun kebun plasma tapi terkendala aturan yang masih belum jelas pada saat penerbitan IUP PT. MJAP."	
28.	Manajemen PTP. Nusantara XIII	1. - 2. -	Perus. Vakum, lahan dikuasai penuh oleh masy. setempat.
29.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PTP.	1. "Masyarakat terlibat penuh." 2. "Baik sekali."	

	NUSANTARA XIII (Saimiun)		
30.	Manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Dwi Surono)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "70% sampai dengan 80% terlibat dalam pembangunan kebun plasma dan kepemilikan kebun plasma." 2. "Secara finansial kebun PT. SGM sangat membantu karena dari Rp. 250 M, dari cadangan baru terealisasi Rp. 50 M sementara pembangunan kebun memerlukan biaya ± Rp. 123 M. 	
31.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Budin Jasa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kebun plasma hanya terbatas dalam hal penyediaan tenaga kerja." 2. "Kemampuan perusahaan dalam hal biaya pembangunan kebun plasma sangat baik, mengingat keseriusan dalam hal investasi di wilayah Barito Timur. 	



Lampiran 3. Deskripsi jawaban narasumber untuk kuisisioner Point C.

C. Karakteristik Badan Pelaksana

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keterlibatan pemerintah dalam mendukung penerapan/implementasi kebijakan publik dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) dengan pola kemitraan di Kabupaten Barito Timur?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana hubungan atau koordinasi perusahaan perkebunan dengan pemerintah Kabupaten Barito Timur?

No.	Narasumber	Deskripsi Jawaban	Ket.
1.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Ir. Riza Rahmadi, M.M)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Keterlibatan pemerintah adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke PBS sesuai petunjuk di dalam Permentan No. 98/2013 dan Perda Kalteng No. 5 Tahun 2010 serta Pergub Kalteng No. 12 Tahun 2014. Dan pemerintah menyampaikan secara rutin melalui surat kedinasan dan teguran terkait pelaksanaan pembangunan kebun plasma." 2. "Hubungan dan koordinasi terjalin dengan baik. Hal diketahui dengan rutinnya pihak PBS berkoordinasi ke Pemerintah Daerah dan pihak PBS selalu terbuka terhadap upaya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah." 	
2.	Kepala Bidang Perkebunan (Supadmin, S.P, M.M.A)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Pemerintah mendorong PBS agar dapat merealisasikan plasma minimal 20%." 2. "Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan plasma." 	
3.	Kepala Seksi Binus PPHP (Oktavina, S.Hut)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Pemerintah melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan kepada perusahaan perkebunan terkait kewajiban pembangunan kebun plasma." 2. "Hubungan terjalin baik." 	
4.	Manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Rudi Indrawan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Bentuk keterlibatan pemerintah yaitu dengan keluarnya kebijakan perihal 20% untuk plasma masyarakat dari areal perusahaan." 2. "Bentuk koordinasi perusahaan dengan pemerintah adalah adanya bentuk pelaporan bulanan atau pertriwulan sehingga segala perkembangan perusahaan diketahui oleh pemerintah." 	
5.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Neneng K.I)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Keterlibatan pemerintah cukup mendukung penuh dengan dikeluarkannya SK CPCL." 2. "Hubungannya berjalan dengan sangat baik." 	

6.	Manajemen PT. Borneo Subur Semesta (Helman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Keterlibatan pemerintah sudah cukup baik, hanya dalam penetapan kebijaksanaan atau aturan tidak tegas." 2. "Cukup baik." 	
7.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Subur Semesta (Arianto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Supaya perekonomian masyarakat desa/kecamatan/kabupaten bisa semakin membaik dengan adanya perusahaan yang berbentuk pola kemitraan." 2. "Hubungan antara perusahaan dengan pemerintah sangat baik mendukung investor yang beroperasi di wilayah kabupaten tersebut." 	
8.	Manajemen PT. Ciliandry Anky Abadi (Helman Yusuf)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sangat baik, pemerintah daerah selalu melakukan pembinaan, sosialisasi terkait pembangunan plasma." 2. "Sangat baik, perusahaan terbuka dan menerima pembinaan/sosialisasi dari pemerintah daerah." 	
9.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Ciliandry Anky Abadi (Ananta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Pemerintah aktif menyuarakan hak masyarakat untuk menerima 20% kebun plasma kepada perusahaan perkebunan." 2. "Perusahaan sangat mampu membangun kebun plasma." 	
10.	Manajemen PT. Heroes Green Energy (Amir Mahmud)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Pihak pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat." 2. "Yang kami rasakan cukup baik." 	
11.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy (Sindelman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Cukup bagus dan telah ada dukungannya." 2. "Baik." 	
12.	Manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Anton Siregar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Pemerintah sangat mendukung kebijakan ini." 2. "Terjalin baik." 	
13.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tamiyang Sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sangat aktif mendukung penerapan kebijakan plasma." 2. "Terjalin cukup baik untuk tingkat desa sampai kabupaten." 	

	Rejeki (Dewiantoro)		
14.	Manajemen PT. Tirta Madu (Abdi Wahyu S.)	1. "Cukup aktif." 2. "Baik."	
15.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tirta Madu (Riwat)	1. "Untuk pemerintah kurang pembinaan dan pengawasan." 2. "Untuk hubungan sudah baik."	
16.	Manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Suwari)	1. "Pemerintah sangat mendukung implementasi pembangunan kebun masyarakat di sekitar kebun inti PT. BCL yaitu dengan memberikan pelayanan/penerbitan SK CPCL kemitraan, surat-surat kedinasan terkait kewajiban pembangunan masyarakat." 2. "Koordinasi antara pemerintah dengan PT. BCL berjalan dengan baik, dan PT. BCL selalu rutin menyampaikan kemajuan fisik perusahaan berupa laporan rutin."	
17.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang (Hengky Khairudin)	1. "Sangat baik, karena Pemda selalu mendorong percepatan pembangunan kebun plasma, sehingga target minimal 20% dari luas inti dapat tercapai." 2. "Baik, tetapi kadang terkendala masalah birokrasi sehingga sedikit menghambat koordinasi antar keduanya."	
18.	Manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Erwin Fahriady)	1. "Cukup baik." 2. "Cukup baik."	
19.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah (Rici Juprianto)	1. "Cukup aktif dalam segala hal pengarahannya, pengawasan dan pembinaan masyarakat dan perusahaan." 2. "Ini bukan kapasitas kami, namun secara umum hubungan sangat baik."	
20.	Manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi	1. "Keterlibatan pemerintah cukup baik dalam mendukung, ini terbukti dengan dibantunya/dikeluarkannya SK CPCL Tahap 1 dan 2 PT. ISA." 2. "Hubungannya berjalan dengan baik."	

	(Bernard P. Siagian)		
21.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Indopenta Sejahtera Abadi(Leni)	1. "Keterlibatan pemerintah dengan adanya aturan pola kemitraan 20%." 2. "Berjalan baik."	
22.	Manajemen PT. Ketapang Subur Lestari (Erwin Fahriady)	1. "Cukup baik." 2. "Cukup baik."	
23.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Ketapang Subur Lestari (Sindelman)	1. "Sangat baik, pemerintahan daerah berperan serta mendorong perusahaan perkebunan untuk merealisasikan plasma." 2. "Baik."	
24.	Manajemen PT. Sandabi Indah Lestari (Budi I.)	1. "Sangat aktif serta berperan sesuai dengan fungsinya." 2. "Sudah berjalan aktif dan harmonis."	
25.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Sandabi Indah Lestari (Witerman)	1. "Cukup terlibat dengan adanya sosialisasi bersama-sama dengan perusahaan." 2. "Cukup baik."	
26.	Manajemen PT. Mitra Jaya Agro Palm (Suradi)	1. "Pemerintah selalu mendorong agar setiap PBS merealisasikan pembangunan kebun plasma. Pemerintah selalu memberikan pengawasan kepada PBS." 2. "Selalu terjalin harmonis dan saling bekerja sama agar terjadi kesinambungan dalam pembangunan kebun."	
27.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Mitra Jaya Agro Palm (H. Swani)	1. "Pemerintah selalu mendorong dan memonitoring pembangunan kebun plasma." 2. "Sangat baik."	
28.	Manajemen PTP. Nusantara XIII	1. - 2. -	Perus. Vakum, lahan dikuasai

			peny oleh masy. setempat.
29.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PTP. Nusantara XIII(Saimiun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sangat mendukung karena pemerintah selalu mendorong percepatan pembangunan kebun plasma." 2. "Baik." 	
30.	Manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Dwi Surono)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sangat dominan untuk pengawasan realisasi plasma." 2. "Sangat baik." 	
31.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Budin Jasa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan plasma sangat baik, yang dilihat dari peran serta pemda dalam hal percepatan pembangunan kebun plasma yang dilakukan dengan sosialisasi dan monitoring ke PBS." 2. "Sangat baik, karena PBS sangat merespon positif langkah pemerintah dalam hal merealisasikan pembangunan kebun plasma seiring dengan pembangunan kebun inti." 	



Lampiran 4. Deskripsi jawaban narasumber untuk kuisisioner Point D.

D. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah perusahaan perkebunan mengetahui kewajiban pembangunan kebun masyarakat (plasma) seluas 20% dari areal yang diusahakan perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait kewajiban perusahaan dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma) seluas 20% dari areal yang diusahakan perusahaan perkebunan di Kabupaten Barito Timur?

No.	Narasumber	Deskripsi Jawaban	Ket.
1.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Ir. Riza Rahmadi, M.M)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Pihak perusahaan perkebunan sangat jelas telah mengetahui kewajiban pembangunan kebun plasma, karena telah mendapatkan sosialisasi serta surat kedinasan secara rutin. Dan dalam mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan pelaku usaha diwajibkan menyisihkan 20% areal pelepasan untuk kebun plasma." 2. "Telah dilaksanakan sosialisasi oleh Pemkab Bartim, yang ditujukan untuk pelaku usaha (PBS), SKPD teknis, DPRD, Camat, Kades, Damang dan perwakilan masyarakat, sosialisasi tersebut antara lain; 1). Tahun 2011 s.d 2013, 2). Sosialisasi Perda Provinsi Kalteng No. 5 Tahun 2011, Tahun 2015 Sosialisasi Pergub Kalteng No. 12 Tahun 2014, 3). Surat-surat kedinasan terkait pembinaan PBS terhadap pembangunan kebun plasma." 	
2.	Kepala Bidang Perkebunan (Supadmin, S.P, M.M.A)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "PBS telah mengetahui dan pemerintah mendorong implementasi plasma untuk masyarakat." 2. "Sebelum pengajuan IUP, PBS dijelaskan kewajiban pembangunan plasma minimal 20%. PUP (Penilaian Usaha Perkebunan) adalah salah satu unsur penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan kebun plasma oleh PBS." 	
3.	Kepala Seksi Binus PPHP (Oktavina, S.Hut)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sangat mengetahui karena tertera jelas dalam Izin Usaha Perkebunan yang mereka miliki di mana disebutkan bahwa kewajiban perusahaan adalah menyediakan 20% plasma untuk masyarakat." 2. "Ada." 	
4.	Manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Rudi Indrawan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Mengetahui dan sudah diterapkan." 2. "Ada. Sudah ada sosialisasi dan pihak legislatif pun turut melakukan controlling untuk kebijakan tersebut." 	

5.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Neneng K.I)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Menurut saya perusahaan perkebunan sangat mengetahui dengan baik program dari pemerintah seluas 20%." 2. "Belum ada sosialisasi di desa perihal 20% dari areal yang diusahakan perusahaan." 	
6.	Manajemen PT. Borneo Subur Semesta (Helman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Pasti mengetahui karena ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur." 2. "Secara tersendiri dari pemerintah/instansi tidak ada, hanya sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan perusahaan." 	
7.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Subur Semesta (Arianto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sesuai dengan peraturan perundang-undangan kabupaten, dan perusahaan maka luasan 20% masyarakat 80% perusahaan." 2. "Ada." 	
8.	Manajemen PT. Ciliandry Abadi (Helman Yusuf)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Mengetahui." 2. "Ada." 	
9.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Ciliandry Abadi (Ananta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Mengetahui." 2. "Ada." 	
10.	Manajemen PT. Heroes Green Energy (Amir Mahmud)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Perusahaan cukup mengetahui dengan bukti perusahaan dengan serius membangun kebun masyarakat." 2. "Ada, dengan ikut serta dalam rangka sosialisasi bersama pihak perusahaan." 	
11.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy (Sindelman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Mengetahui dengan bukti sudah ada pembangunan kebun plasma." 2. "Ada sewaktu masuk perusahaan." 	
12.	Manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Anton Siregar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sangat mengetahui karena kewajiban plasma sudah tersiar baik di media cetak maupun elektronik bahkan tertuang dalam peraturan pedoman perizinan perkebunan." 2. "Ada sosialisasi dan pernah kita ikuti." 	
13.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tamiyang	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Mengetahui karena PT. TSR telah melaksanakan sosialisasi keberadaan perusahaan tersebut di wilayah kami dan dalam sosialisasinya telah disampaikan terkait kebijakan plasma 20% dari inti." 	

	Sumber Rejeki (Dewiantoro)	2. "Ada sosialisasi yang dimulai dari diundang Kades kami untuk ikut sosialisasi di Mantawara terkait plasma, kemudian Kades menyampaikan kepada kami melalui pertemuan di Balai Desa."	
14.	Manajemen PT. Tirta Madu (Abdi Wahyu S.)	1. "Mengetahui." 2. "Ada."	
15.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tirta Madu (Riwat)	1. "Tahu, sudah sosialisasi." 2. "Ada tapi kurang, tidak paham."	
16.	Manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Suwari)	1. "PT. BCL mengetahui kewajiban pembangunan kebun masyarakat (plasma) 20%. Namun IUP dan HGU PT. BCL telah terbit sebelum tahun 2007, sehingga PT. BCL terkendala masalah ketersediaan lahan. Dan saat ini PT. BCL tetap berkomitmen terhadap kewajiban dimaksud dengan menerapkan kemitraan lainnya." 2. "PT. BCL pernah mengikuti sosialisasi dari pemerintah terkait kewajiban plasma, ditahun 2010, 2013 dan 2015, serta surat kedinasan setiap tahun terkait kewajiban pembangunan kebun masyarakat."	
17.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang (Hengky Khairudin)	1. "Mengetahui, karena sebelum investasi dilaksanakan pasti investor sudah memahami langkah dan kewajiban mereka ketika mereka akan berinvestasi." 2. "Ada sosialisasi tapi kadang PBS yang lambat merealisasikan hasil dari sosialisasi tersebut."	
18.	Manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Erwin Fahriady)	1. "Mengetahui." 2. "Ada."	
19.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah (Rici Juprianto)	1. "Mengetahui dan ada bukti yaitu plasma yang sudah berjalan." 2. "Ada."	
20.	Manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Bernard P.	1. "Kami sudah atau telah mengetahui adanya kewajiban pembangunan kebun plasma 20% mulai dari awal pembukaan lahan bahkan kami sosialisasikan dengan masyarakat bersamaan dengan sosialisasi rembuk desa (Pembukaan lahan)."	

	Siagian)	2. "Kalo untuk sosialisasi resmi tidak ada tapi secara lisan ada dan secara aturan di Pemkab (Perda)."	
21.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Leni)	1. "Menurut saya telah mengetahui dan telah diimplementasikan." 2. "Untuk di desa belum ada."	
22.	Manajemen PT. Ketapang Subur Lestari (Erwin Fahriady)	1. "Sangat mengetahui." 2. "Ada sosialisasi."	
23.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Ketapang Subur Lestari (Sindelman)	1. "Sangat mengetahui." 2. "Ada."	
24.	Manajemen PT. Sandabi Indah Lestari (Budi I.)	1. "Ya sangat mengetahui." 2. "Ya sudah ada dilakukan bahkan sejak awal perusahaan masuk."	
25.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Sandabi Indah Lestari (Witerman)	1. "Jelas mengetahui dengan bukti adanya pembangunan kebun plasma." 2. "Ada."	
26.	Manajemen PT. Mitra Jaya Agro Palm (Suradi)	1. "Mengetahui karena sudah tertuang dalam Permentan dan Perda." 2. "Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan setiap ada pertemuan antara PBS dan Pemda."	
27.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Mitra Jaya Agro Palm (H. Swani)	1. "Mengetahui karena ada peraturan yang mengharuskan adanya 20% dari kebun inti." 2. "Ada."	
28.	Manajemen PTP. Nusantara XIII	1. - 2. -	Perus. Vakum, lahan dikuasai penuh oleh

			masy. setempat.
29.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PTP. Nusantara XIII(Saimiun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Mengetahui karena sudah tertuang dalam IUP." 2. "Ada melalui Dinas Pertanian." 	
30.	Manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Dwi Surono)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sangat mengetahui ." 2. "Ada." 	
31.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Budin Jasa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Mengetahui karena sudah tertuang dalam Permentan dan Perda tentang kewajiban yang harus dipenuhi dalam berinvestasi di suatu daerah khususnya perkebunan kelapa sawit." 2. "Ada dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, baik berupa pertemuan PBS dan Pemda maupun melalui surat tertulis." 	



Lampiran 5. Deskripsi jawaban narasumber untuk kuisioner Point E.

E. Disposisi/Sikap Para Pelaksana

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tanggapan perusahaan perkebunan dalam penerapan/implementasi kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma), dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan, selaku penerima sasaran dari pembangunan kebun masyarakat (plasma) oleh perusahaan perkebunan dengan pola kemitraan?

No.	Narasumber	Deskripsi Jawaban	Ket.
1.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Ir. Riza Rahmadi, M.M)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Perusahaan menanggapi secara positif terhadap kebijakan dimaksud karena dalam hal ini bagi PBS akan menjadi keuntungan, bahwa kebun plasma dapat menjadi pagar hidup terhadap stabilitas sosial di sekitar kebun inti." 2. "Masyarakat menyambut baik terhadap pembangunan kebun plasma dan upaya kemitraan lainnya yang diwujudkan oleh PBS." 	
2.	Kepala Bidang Perkebunan (Supadmin, S.P, M.M.A)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "PBS merespon baik dan berupaya membangun kebun plasma/kemitraan." 2. "Masyarakat menyambut dengan baik atas terbangunnya plasma. Agar PBS meningkatkan kerjasama kemitraan." 	
3.	Kepala Seksi Binus PPHP (Oktavina, S.Hut)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Baik, dan memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut." 2. "Masyarakat menyambut baik atas terbangunnya kebun masyarakat (plasma) oleh perusahaan perkebunan." 	
4.	Manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Rudi Indrawan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Perusahaan sangat mendukung pola kebijakan tersebut. Selain itu juga guna menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat." 2. "Tanggapan masyarakat sangat positif." 	
5.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Neneng K.I)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Menurut saya tanggapan perusahaan sangat positif dan tangan terbuka menyambut kebijakan tersebut." 2. "Tanggapan dari kami sebagai masyarakat sangat merespon positif." 	

6.	Manajemen PT. Borneo Subur Semesta (Helman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Tanggapan perusahaan positif karena saat ini lahan untuk diusahakan pembangunan perkebunan tidak ada lagi karena lahan telah dikuasai oleh masyarakat." 2. "Pada umumnya anggota masyarakat masih ragu atas pola ini karena pada umumnya masyarakat Bartim mau instan." 	
7.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Subur Semesta (Arianto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Setuju saja." 2. "Kami selaku masyarakat sangat mengharapkan dengan adanya pola kemitraan ini." 	
8.	Manajemen PT. Ciliandry Anky Abadi (Helman Yusuf)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Perusahaan perkebunan menerima dengan baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut." 2. "Masyarakat sangat menyambut baik program/kebijakan tersebut karena memberi manfaat besar dalam peningkatan penghasilan masyarakat." 	
9.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Ciliandry Anky Abadi (Ananta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Untuk masyarakat di sekitar PT. CAA belum ada tanggapan dari PT. CAA tentang pembangunan plasma." 2. "Masyarakat sangat mengharapkan perusahaan PT. CAA dapat membangun kebun plasma." 	
10.	Manajemen PT. Heroes Green Energy (Amir Mahmud)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Perusahaan menanggapi dengan positif karena akan mengurangi konflik dengan masyarakat." 2. "Ada yang baik ada yang kurang baik, tergantung dari pendidikan dan pengalaman." 	
11.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy (Sindelman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Cukup bagus dengan bukti nyata adanya kebun plasma." 2. "Positif." 	
12.	Manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Anton Siregar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Perusahaan menyambut baik kebijakan ini sebagai bagian dari pengamanan kebun inti dari masalah sosial dengan masyarakat sekitar." 2. "Masyarakat menyambut baik terhadap kebijakan plasma dan terkait pola kemitraan lainnya." 	
13.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tamiyang Sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Tanggapan PT. TSR setahu kami, akan melaksanakan pembangunan kebun plasma bersamaan dengan kebun inti setelah PT. TSR melaksanakan pembebasan lahan/GRTT dari masyarakat." 2. "Sejauh dari informasi teman dan keluarga di masyarakat 	

	Rejeki (Dewiantoro)	sekitar PT. BKI, PT. SGM, PT. ISA telah menjalankan kebijakan ini dan kami harapkan untuk PT. TSR dapat segera melaksanakan pembangunan kebun masyarakat.”	
14.	Manajemen PT. Tirta Madu (Abdi Wahyu S.)	1. “Baik dan mendapat dukungan dari masyarakat.” 2. “Baik dan terbantu perekonomian masyarakat.”	
15.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tirta Madu (Riwat)	1. “Bagus karena perusahaan baik.” 2. “Masyarakat menerima tapi kurang diberi pemahaman.”	
16.	Manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Suwari)	1. “PT. BCL mendukung sepenuhnya kebijakan pembangunan kebun masyarakat (plasma) sehingga hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar tetap terjalin harmonis.” 2. “Masyarakat menyambut positif kebijakan tersebut, hal ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menegaskan kepada perusahaan perkebunan dalam mewujudkan kemitraan dengan masyarakat.”	
17.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang (Hengky Khairudin)	1. “Sangat mendukung karena mereka memiliki kewajiban tersebut.” 2. “Masyarakat sangat mengharapkan hal tersebut karena itu merupakan bentuk perhatian PBS terhadap masyarakat.”	
18.	Manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Erwin Fahriady)	1. “Tidak ada masalah, mengikuti ketentuan yang ada.” 2. “Cukup baik dan menerima.”	
19.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah (Rici Juprianto)	1. “Sangat baik dan ada bukti plasma sudah ada.” 2. “Cukup baik dan tidak ada kendala.”	
20.	Manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi	1. “Tanggapan perusahaan positif dengan tangan terbuka menyambut kebijakan dengan pola kemitraan yang diatur oleh pemerintah.” 2. “Tanggapan masyarakat merespon positif.”	

	(Bernard P. Siagian)		
21.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Indopenta Sejahtera Abadi(Leni)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sangat mendukung pola kebijakan tersebut." 2. "Menurut saya tanggapan positif." 	
22.	Manajemen PT. Ketapang Subur Lestari (Erwin Fahriady)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sangat baik." 2. "Sangat baik." 	
23.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Ketapang Subur Lestari (Sindelman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Perusahaan bersedia menyediakan/membuat kebun plasma untuk masyarakat." 2. "Menerima dan menyambut baik karena memberi manfaat dalam penambahan penghasilan keluarga." 	
24.	Manajemen PT. Sandabi Indah Lestari (Budi I.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Harus dilaksanakan walaupun menurut kami agak berat serta harus mengeluarkan biaya lebih." 2. "Ya ada yang sangat puas, ada juga yang masih belum puas." 	
25.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Sandabi Indah Lestari (Witerman)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Baik dengan bukti adanya kebun plasma di PBS lain dan akan ditiru oleh PT. SIL." 2. "Baik." 	
26.	Manajemen PT. Mitra Jaya Agro Palm (Suradi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "PBS merespon dengan baik dan sangat mendukung program tersebut." 2. "Masyarakat menyambut baik program kemitraan tersebut karena merasa dilibatkan dalam pembangunan kebun dan dapat menambah income." 	
27.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Mitra Jaya Agro Palm (H. Swani)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sangat mendukung tetapi tindakan belum dilaksanakan." 2. "Sangat mendukung karena merupakan harapan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan kebun." 	
28.	Manajemen PTP. Nusantara XIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. - 	Perus. Vakum, lahan dikuasai

			penuh oleh masy. setempat.
29.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PTP. Nusantara XIII(Saimiun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sangat mendukung karena merupakan kewajiban perusahaan perkebunan terhadap masyarakat." 2. "Sangat mengharapkan mendapat plasma karena mendapatkan hasil tambahan." 	
30.	Manajemen PT. Sawit Graha Manunggal (Dwi Surono)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sangat mendukung program tersebut untuk keamanan dan menjaga iklim investasi yang kondusif." 2. "Antusias." 	
31.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Budin Jasa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Perusahaan menyambut baik karena itu merupakan kewajiban dalam berinvestasi yaitu mensejahterakan masyarakat salah satunya melalui pola kemitraan yang sudah dituangkan." 2. "Cukup senang karena melalui hasil pola kemitraan masyarakat dapat menerima hasil tambahan dari kebun plasma." 	

Lampiran 6. Deskripsi jawaban narasumber untuk kuisioner Point F.

F. Kondisi Sosial Ekonomi

1. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu, bagaimana pendapatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan, sebelum adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma)?
2. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu, bagaimana pendapatan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan, sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma)?

No.	Narasumber	Deskripsi Jawaban	Ket.
1.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur (Ir. Riza Rahmadi, M.M)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sebelum adanya pembangunan kebun masyarakat, pendapatan masyarakat masih tergantung dari mata pencaharian rutin." 2. "Sesudah adanya pembangunan kebun masyarakat (plasma), pendapatan masyarakat sekitar perusahaan sebagai anggota plasma, mendapatkan tambahan penghasilan dari sisa penjualan TBS setelah potongan kredit." 	
2.	Kepala Bidang Perkebunan (Supadmin, S.P, M.M.A)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Optimis PBS mampu membangun kebun plasma." 2. "Ada tambahan pendapatan untuk masyarakat." 	
3.	Kepala Seksi Binus PPHP (Oktavina, S.Hut)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Sebelum plasma ada masyarakat masih tergantung pada pendapatan rutin/mata pencaharian rutin seperti tani, dan lain-lain." 2. "Sesudah adanya plasma, pendapatan masyarakat ada penambahan dari hasil kebun plasma." 	
4.	Manajemen PT. Agro Mandiri Sukses (Rudi Indrawan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Masyarakat awalnya cuma berkebun, bertani atau nelayan sehingga masih kekurangan." 2. "Masyarakat sangat senang karena selain dapat bekerja di perusahaan, mereka juga mendapat kebun plasma guna menunjang hidup mereka." 	
5.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Agro Mandiri Sukses (Neneng K.I)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Pendapatan masyarakat sekitar sangat pas-pasan." 2. "Setelah adanya program pemerintah yang dilakukan atau diterapkan oleh perusahaan perkebunan, pendapatan masyarakat meningkat." 	
6.	Manajemen PT. Borneo Subur Semesta	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Pendapatan masyarakat sebelum masuk perkebunan masih di bawah UMP tetapi setelah perkebunan masuk ekonomi mereka meningkat." 2. "Adanya peningkatan pendapatan rata-rata mereka" 	

	(Helman)	mendapatkan upah saat ini dia atas Rp. 100.000/hari dan tidak tergantung cuaca lagi bagi petani karet.”	
7.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Subur Semesta (Arianto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Saling menguntungkan kedua belah pihak masyarakat maupun perusahaan.” 2. “Sangat menunjang usaha perekonomian kami masyarakat desa.” 	
8.	Manajemen PT. Ciliandry Anky Abadi (Helman Yusuf)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Pendapatan masih mengandalkan hasil tanaman karet keluarga.” 2. “Ada penambahan pendapatan dari hasil kebun plasma.” 	
9.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Ciliandry Anky Abadi (Ananta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Masih berharap pada pendapatan petani sebagai petani karet.” 2. “Sangat berharap ada penambahan atau peningkatan pendapatan.” 	
10.	Manajemen PT. Heroes Green Energy (Amir Mahmud)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Pendapatan masyarakat masih di bawah UMP karena banyak masyarakat tergantung cuaca.” 2. “Pendapatan masyarakat makin meningkat dengan adanya perusahaan di sekitar, dan tidak lagi tergantung dari cuaca bagi penoreh karet.” 	
11.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Heroes Green Energy(Sindelma)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Masih kurang.” 2. “Bertambah.” 	
12.	Manajemen PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Anton Siregar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Masyarakat sekitar PT. TSR lebih didominasi oleh petani karet lokal.” 2. “Apabila PT. TSR telah membangun kebun inti dan plasma bagi masyarakat sekitar, tentulah masyarakat sekitar akan mendapatkan penghasilan tambahan.” 	
13.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tamiyang Sumber Rejeki (Dewiantoro)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Pendapatan kami pada saat ini tergantung dari naik turunnya dari harga komoditi karet.” 2. “Informasi dari keluarga di PT. SGM adanya kebun plasma telah menambah penghasilan mereka.” 	
14.	Manajemen PT. Tirta Madu (Abdi Wahyu S.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Masyarakat masih mengharapkan hasil hutan.” 2. “Meningkat apabila diterapkan karena adanya lapangan pekerjaan baik dari perusahaan maupun sekitarnya.” 	
15.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Tirta	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Susah.” 2. “Sudah mulai dapat uang lebih tetapi dari grup CAA lain yaitu PT. BKI, untuk PT. Tirta Madu belum. PT. 	

	Madu (Riwat)	Tirta Madu berada di wilayah desa kami.”	
16.	Manajemen PT. Bhadra Cemerlang (Suwari)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Pendapatan masyarakat sekitar sebelum adanya pembangunan plasma/kemitraan bergantung dari hasil kebun lokalan di mana produksi kebunnya tidak memenuhi standar/volume yang diharapkan belum mencukupi/belum sesuai.” 2. “Masyarakat sekitar PT. BCL terbantu dengan mendapatkan penyuluhan/pembinaan, bibit unggul, pupuk berkualitas, sehingga hasil kebun masyarakat yang bermitra dengan PT. BCL mampu untuk meningkatkan pendapatan keluarga.” 	
17.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Bhadra Cemerlang (Hengky Khairudin)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Masih di bawah dari standar kebutuhan hidup masyarakat, karena mata pencaharian utama dari perkebunan yang sangat dipengaruhi musim.” 2. “Agak sedikit mendekati kesejahteraan karena masyarakat dapat bekerja di PBS dan mendapatkan hasil tambahan dari kebun plasma.” 	
18.	Manajemen PT. Borneo Ketapang Indah (Erwin Fahriady)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Hanya mengandalkan bertani.” 2. “Ada peningkatan/tambahan penghasilan selain masyarakat sekitar bekerja sebagai karyawan perusahaan tersebut, seiring berjalannya waktu, bertambah usia tanamannya, tentu hasil plasma akan naik juga.” 	
19.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Borneo Ketapang Indah (Rici Juprianto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “-.” 2. “Kami ada tambahan penghasilan.” 	
20.	Manajemen PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Bernard Siagian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Sepengetahuan saya yaitu sangat pas-pasan setelah adanya kebun plasma ada sedikit perubahan ke lebih baik/meningkat.” 2. “Setelah adanya kebun plasma, pendapatan masyarakat meningkat.” 	
21.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Indopenta Sejahtera Abadi (Leni)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Kurang/masih di bawah standar perihal pendapatan tersebut.” 2. “Pendapatan sudah meningkat.” 	
22.	Manajemen PT. Ketapang Subur Lestari (Erwin Fahriady)	<ol style="list-style-type: none"> 1. “-.” 2. “Ada tamhahan penghasilan.” 	
23.	Perwakilan	1. “Pendapatan dari penghasilan rutin sebagai tani karet.”	

	Masyarakat di sekitar PT. Ketapang Lestari (Sindelma)	2. "Ada penambahan dari hasil kebun plasma."	
24.	Manajemen Sandabi Lestari (Budi I.)	1. "Ya ada sedikit meningkat walaupun belum 100%." 2. "Yang pasti ada sedikit menambah nilai tambah khususnya ekonomi masyarakat."	
25.	Perwakilan Masyarakat di sekitar Sandabi Lestari (Witerman)	1. "Dalam keadaan pas-pasan." 2. "Sangat banyak perubahan yang lebih baik jika diterapkan."	
26.	Manajemen Mitra Jaya Palm (Suradi)	1. "Kurang yakin dengan kehadiran PBS apakah mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar PBS." 2. "Adanya income/tambahan dari hasil kebun walaupun masih belum sesuai yang diharapkan karena masih merupakan tanaman yang baru menghasilkan."	
27.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PT. Mitra Jaya Agro Palm (H. Swani)	1. "Ragu-ragu apakah kehadiran PBS dapat mensejahterakan masyarakat." 2. "Belum memberikan pengaruh yang signifikan bagi perekonomian masyarakat."	
28.	Manajemen PTP. Nusantara XIII	1. - 2. -	Perus. Vakum, lahan dikuasai penuh oleh masy. setempat.
29.	Perwakilan Masyarakat di sekitar PTP. Nusantara XIII (Saimiun)	1. "Berada di bawah harapan karena bergantung pada sektor perkebunan." 2. "Mulai sejahtera karena dapat bekerja di perusahaan perkebunan dan dapat hasil tambahan dari kebun plasma."	
30.	Manajemen Sawit Manunggal (Dwi Surono)	1. "Terbantu dan ada peningkatan." 2. "Ada perubahan ke arah perbaikan."	
31.	Perwakilan Masyarakat di	1. "Rata-rata pendapatan sebelum adanya pola kemitraan yaitu berada di bawah rata-rata karena masyarakat	

	sekitar PT. Sawit Graha Manunggal (Budin Jasa)	hanya bergantung dari hasil alam.” 2. “Setelah adanya kebun plasma/pola kemitraan rata-rata pendapatan sudah ke arah sejahtera karena masyarakat mulai merasakan hasil dari pola kemitraan walaupun masih kurang dari harapan mengingat usia tanaman yang masih muda.	
--	--	--	--

